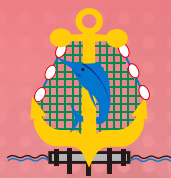




LAPORAN

Tahunan
2024



Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengembangan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, laporan tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai kegiatan, pencapaian, serta tantangan yang dihadapi PPN Pengambangan selama tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait target operasional, keuangan, dan program-

program tertentu yang telah dilaksanakan.

Bali dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata utama dunia, namun juga memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap. Dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, Bali menjadi pusat perikanan penting di Indonesia. PPN Pengambangan dan Pelabuhan Umum Benoa berperan sebagai pusat kegiatan penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan, serta memberikan dukungan bagi kesejahteraan nelayan lokal dan industri perikanan di daerah sekitarnya

Pada tahun 2024, PPN Pengambangan mencatat peningkatan signifikan dalam pendaratan ikan, mencapai 23.493 ton, atau rata-rata produksi sebesar 72,73 ton per hari dan di PU Benoa pendaratan ikan mencapai 45.185 ton atau rata-rata 123 ton per hari, pencapaian tersebut menuntut upaya lebih dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan. Kami juga berbangga bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari Sumber Daya Alam (SDA) ataupun non SDA mencapai angka yang memuaskan, menunjukkan keseriusan efektivitas pengelolaan pelabuhan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pegawai PPN Pengambengan, nelayan, pengusaha, dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam operasional PPN Pengambengan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi yang telah diberikan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah-langkah strategis di masa depan, demi pengelolaan pelabuhan yang lebih baik dan berkelanjutan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di sektor perikanan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Pengambengan, Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengambengan



Andi Mannoengi, S.St.Pi, M.Pi



DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Tujuan.....	3
1. 3. Ruang Lingkup	3

BAB II. PROFILE PPN PENGAMBENGAN.....	4
2.1. Lokasi dan Sejarah PPN Pengambengan.....	4
2.2. Struktur dan Organisasi	5
2.3. Komposisi Pegawai	7
2.4. Alokasi Anggaran.....	8
2.5. Fasilitas dan Operasional.....	9

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	13
3.1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelabuhan.....	13
3.1.1. Publikasi Pelabuhan Perikanan.....	13
3.1.2. Statistik Perikanan Tangkap	25
3.1.3. Pelayanan Mutu Hasil Tangkapan.....	27
3.1.4. Pelayanan Dokumen Persyaratan Ekspor	33
3.1.5. Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan.....	39
3.1.6. PNBP Pasca Produksi.....	42
3.1.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Operasional Pelabuhan.....	43



3.2. Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran	46
3.2.1. Pelayanan SPB.....	46
3.2.2. Pelayanan Log Book Penangkapan Ikan	48
3.2.3. Penerbitan STLBKK	52
3.2.4. Pelayanan Penerbitan SHTI.....	53
3.2.5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan dan Surat Kepatuhan Kapal (Pendaftaran kapal di RFMO).....	61
3.2.6. Operasional KM. Lumba-Lumba	62
3.2.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kesyahbandaran	63
3.3. Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.....	66
3.3.1. Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP).....	66
3.3.2. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pembangunan	68
3.3.3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.....	72
3.4. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajerial	73
3.4.1. Pelaksanaan Anggaran.....	74
3.4.2. Pengelolaan Administrasi Persuratan	77
3.4.3. Pengelolaan Kepegawaian.....	80
3.4.4. Pelaksanaan K5	84
3.4.5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).....	86
BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	91
4.1. Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan	91
4.2. Kelompok Kerja Kesyahbandaran.....	92
4.3. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	95
4.4. Kelompok Kerja Dukungan Manajerial	97



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi PPN Pengambengan	7
-----------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian	8
Tabel 2. Pagu Anggaran DIPA TA 2024 berdasarkan jenis belanja	8
Tabel 3. Pagu Anggaran DIPA TA 2024 berdasarkan jenis keluaran (output).....	9
Tabel 4. Fasilitas Pokok PPN Pengambengan.....	9
Tabel 5. Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan	10
Tabel 6. Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan	11
Tabel 7. Jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Pengambengan	11
Tabel 8. Jumlah kapal yang berpangkalan di PU. Benoa	12
Tabel 9. Data Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	14
Tabel 10. Frekuensi kunjungan kapal di PU. Benoa tahun 2024	15
Tabel 11. Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	16
Tabel 12. Pendaratan Ikan di PU. Benoa Tahun 2024	17
Tabel 13. Frekuensi Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2019 – 2024.....	18
Tabel 14. Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2024 (Per jenis Ikan)	19
Tabel 15. Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	22
Tabel 16. Volume penyaluran BBM Solar oleh PT. Dua Berjaya Tahun 2024.....	23
Tabel 17. Distribusi Hasil Tangkapan Di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	24
Tabel 18. Statistik Hasil Tangkapan Berdasarkan Jenis Ikan	26
Tabel 19. Rekap data statistik PPN Pengambengan Tahun 2024.....	27
Tabel 20. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB	29
Tabel 21. Jumlah Sertifikat CPIB yang telah diterbitkan.....	32
Tabel 22. Data Penerbitan CDS CCSBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa	35

Tabel 23. Data Penerbitan IOTC dan ICCAT <i>Statistical Document</i> di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa.....	38
Tabel 24. Capaian evaluasi kinerja PPN Pengambengan semester I	40
Tabel 25. Capaian evaluasi kinerja PPN Pengambengan semester II	41
Tabel 26. Capaian PNBP Pasca Produksi di PU Benoa	43
Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek CPIB	44
Tabel 28. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2021 – 2024....	47
Tabel 29. Data penerbitan SPB di PU. Benoa	47
Tabel 30. Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	49
Tabel 31. Jumlah Logbook yang Diterima di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa.....	49
Tabel 32. Jumlah Produksi Tangkapan Ikan Berdasarkan Logbook Penangkapan Ikan	50
Tabel 33. Aktivasi-Verifikasi E-logbook Penangkapan Ikan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa Tahun 2024	51
Tabel 34. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kapal Perikanan di PPN Pengambengan	52
Tabel 35. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa.....	55
Tabel 36. Negara Tujuan Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI	58
Tabel 37. Data Penerbitan Surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan Kapal Untuk Pendaftaran RFMO	62
Tabel 38. Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan	64
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2022 dan 2024.....	67
Tabel 40. Realisasi PNBP Tahun 2024	67
Tabel 41. Investor yang sudah masuk PPN Pengambengan	69
Tabel 42. Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2024.....	70
Tabel 43. Realisasi Anggaran Sampai dengan 31 Desember 2024.....	75
Tabel 44. Pagu dan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 45. Jumlah Surat Masuk dan Keluar di PPN Pengambengan Tahun 2024.....	77



Tabel 46. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian.....	80
Tabel 47. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin	80
Tabel 48. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	81
Tabel 49. Komposisi ASN Berdasarkan pangkat/golongan.....	81
Tabel 50. Komposisi pegawai berdasarkan posisi penugasan.....	81
Tabel 51. Komposisi pegawai berdasarkan lokasi penugasan	82
Tabel 52. Kenaikan Pangkat.....	82
Tabel 53. Kenaikan Gaji Berkala	83
Tabel 54. Data personil satpam PPN Pengambengan tahun 2024	85
Tabel 55. Personil tenaga kebersihan PPN Pengambengan tahun 2024	85
Tabel 56. Pengadaan BMN PPN Pengambengan tahun 2024.....	86
Tabel 57. Penetapan Status Penggunaan PPN Pengambengan tahun 20242024	88
Tabel 58. Penghapusan PPN Pengambengantahun 2024	90



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Trend Produksi PPN Pengambengan tahun 2014 – 2024	18
Grafik 2. Frekuensi Pendaratan ikan di PPN Pengambengan tahun 2019 – 2024	19
Grafik 3. Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2024	20
Grafik 4. Jenis ikan dominan yang di daratkan di PPN Pengambengan Tahun 2024	21
Grafik 5. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB	30
Grafik 6. Data Penangkapan dan Ekspor SBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa	36
Grafik 7. Data Ekspor <i>Bigeye Tuna</i> dan <i>Swordfish</i> di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa	39
Grafik 8. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa	56
Grafik 9. Negara-negara Tujuan Ekspor Utama Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Benoa Tahun 2024	60
Grafik 10. Registrasi Persuratan PPN Pengambengan Tahun 2024	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Fasilitas Pokok PPN Pengambengan	104
Lampiran 2. Foto Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan.....	107
Lampiran 3. Foto Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan.....	115
Lampiran 4. Foto Kegiatan Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024	120
Lampiran 5. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun 2024.....	199
Lampiran 6. Daftar Nama Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024	183
Lampiran 7. Daftar Nama Pegawai PPN Pengambengan Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat Pada Tahun 2024	190
Lampiran 8. Daftar Nama Pegawai PPN Pengambengan Yang Memperoleh Kenaikan Gaji Berkala Pada Tahun 2024.....	190

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Bali dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata utama dunia, juga memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap. Dengan wilayah perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, Bali menjadi salah satu pusat perikanan tangkap penting di Indonesia. Potensi ini didukung oleh berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi, termasuk tuna, cakalang, tongkol, lemuru, cumi, kerapu, dan barakuda.

Selat Bali dan Samudera Hindia merupakan dua wilayah utama yang menjadi pusat aktivitas penangkapan ikan di Bali. Selat Bali, yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa, adalah jalur migrasi penting bagi ikan pelagis seperti tuna dan cakalang dan merupakan habitat dari ikan lemuru. Sementara itu, Samudera Hindia di bagian selatan Bali kaya akan sumber daya ikan pelagis besar yang menjadi andalan ekspor.

Selain keanekaragaman jenis ikan, potensi perikanan tangkap di Bali juga didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan berfungsi sebagai pusat kegiatan penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan, serta memberikan dukungan penting bagi kesejahteraan nelayan lokal dan industri perikanan di daerah sekitarnya. Kegiatan perikanan tangkap di Bali juga didukung adanya Pelabuhan Umum Benoa, Pelabuhan Perikanan Sangsit, Pelabuhan Perikanan Kedonganan dan Tanjung Benoa.

Namun, potensi ini juga menghadapi sejumlah tantangan, perubahan iklim, dan pencemaran laut yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa potensi perikanan tangkap di Bali dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan ekologis di masa mendatang.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pelabuhan Binaan Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pengambengan melakukan pembinaan terhadap Pelabuhan Perikanan Perintis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, meliputi:

1. Teknis operasional dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
2. Pendataan jumlah dan nilai hasil produksi ikan;
3. Pengelolaan PNBP di pelabuhan perikanan perintis milik kementerian kelautan dan perikanan;
4. Kegiatan kepelabuhanan perikanan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
5. Pendampingan untuk dukungan kegiatan prioritas lingkup direktorat jenderal perikanan tangkap

PPN Pengambengan memiliki 15 lokasi pelabuhan binaan yang tersebar di tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Pelabuhan Umum Benoa.
2. Pangkalan Pendaratan Ikan Kedonganan.
3. Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong
4. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
5. Pelabuhan Perikanan Sape
6. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar
7. Pelabuhan Perikanan Amagarapati
8. Pelabuhan Perikanan Oeba
9. Pelabuhan Perikanan Tenau
10. Pelabuhan Perikanan Soro Kempo
11. Pelabuhan Perikanan Teluk Awang
12. Pelabuhan Perikanan Paupanda
13. Pelabuhan Perikanan Atapupu
14. Pelabuhan Perikanan Labuan Bajo
15. Pelabuhan Perikanan Alok

PPN Pengambengan melaksanakan fungsi pelayanan pelabuhan perikanan di PU. Benoa, pelayanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik dilaksanakan di hampir seluruh wilayah binaan. Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi dilaksanakan di

seluruh pelabuhan binaan yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan yang melaksanakan PNBP Pasca Produksi.

Pelabuhan Umum Benoa merupakan pelabuhan umum yang melakukan proses bisnis perikanan tangkap. Ukuran kapal perikanan yang melakukan proses bisnis di pelabuhan umum tersebut terbilang cukup besar sampai dengan di atas 300 GT, dengan jenis hasil tangkapan ekonomis tinggi dan jumlah hasil tangkapan yang besar. Sampai saat ini, pendataan, pelayanan dan pengelolaan usaha perikanan tangkap sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PPN Pengembangan mendirikan Pos Pelayanan Kapal Perikanan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pendataan, pelayanan dan pengelolaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Umum Benoa.

1.2. Tujuan

Laporan tahunan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan dirancang untuk menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai selama satu tahun operasional. Berikut adalah tujuan utama dari penyusunan laporan tahunan PPN Pengembangan :

1. Menyajikan gambaran umum tentang PPN Pengembangan
2. Menyajikan pencapaian yang telah dicapai sepanjang tahun 2024 terkait dengan target operasional, keuangan, dan program-program tertentu.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama tahun berjalan dan bagaimana tantangan tersebut telah diatasi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan tahunan PPN Pengembangan dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan transparan tentang profile dan operasional PPN Pengembangan, serta menjadi alat yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan pelabuhan perikanan khususnya di PPN Pengembangan

BAB II

PROFILE PPN PENGAMBENGAN

2.1. Lokasi dan Sejarah PPN Pengambengan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan terletak pada posisi $08^{\circ} 23' 46''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 34' 47''$ Bujur Timur, terletak di desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Berjarak 9 Km dari Kota Negara dan 105 Km dari Kota Denpasar, menghadap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Hindia (Selatan Pulau Jawa) dan Selat Bali.

Kegiatan Perikanan tangkap di PPN Pengambengan telah dimulai sejak empat puluhan tahun yang lalu. Pada mulanya berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 1976/1977. Secara bertahap dikembangkan dan oleh Fisheries Infrastructure Sector Project, dilakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marine Gmbh pada tahun 1988.

Berdasarkan hasil study tersebut, dilakukan pembangunan beberapa fasilitas pada tahun 2000 sampai tahun 2003 antara lain : Break Water, Jetty, Jalan, Tempat Pelelangan Ikan. Sedangkan sampai dengan tahun 2014 terdapat penambahan fasilitas berupa Dermaga, Turap, Groin.

Gubernur Bali, melalui surat Nomor 523.2/0211/Prod/DKP tanggal 28 Pebruari 2005 mengusulkan peningkatan status pelabuhan dengan pertimbangan agar pengelolaannya menjadi lebih terarah dalam rangka menuju pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta karena untuk mengoperasikan pelabuhan perikanan diperlukan jumlah personil dan biaya operasional yang cukup besar, padahal kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai operasional dan pemeliharaan pelabuhan.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dilakukan peningkatan kelas, dari Pangkalan Pendaratan Ikan Pengambengan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambengan. kemudia pada tahun 2008 berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. B.2672/M.PAN/9/2008 tanggal 11 September 2008, peningkatan status kelas dari Pelabuhan Perikanan

Pantai menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara dan diresmikan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tanggal 6 Februari 2009.

2.2. Struktur dan Organisasi

Berdasar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 20/PERMEN-KP/2014, Pelabuhan Perikanan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Persetujuan Berlayar;
- Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;

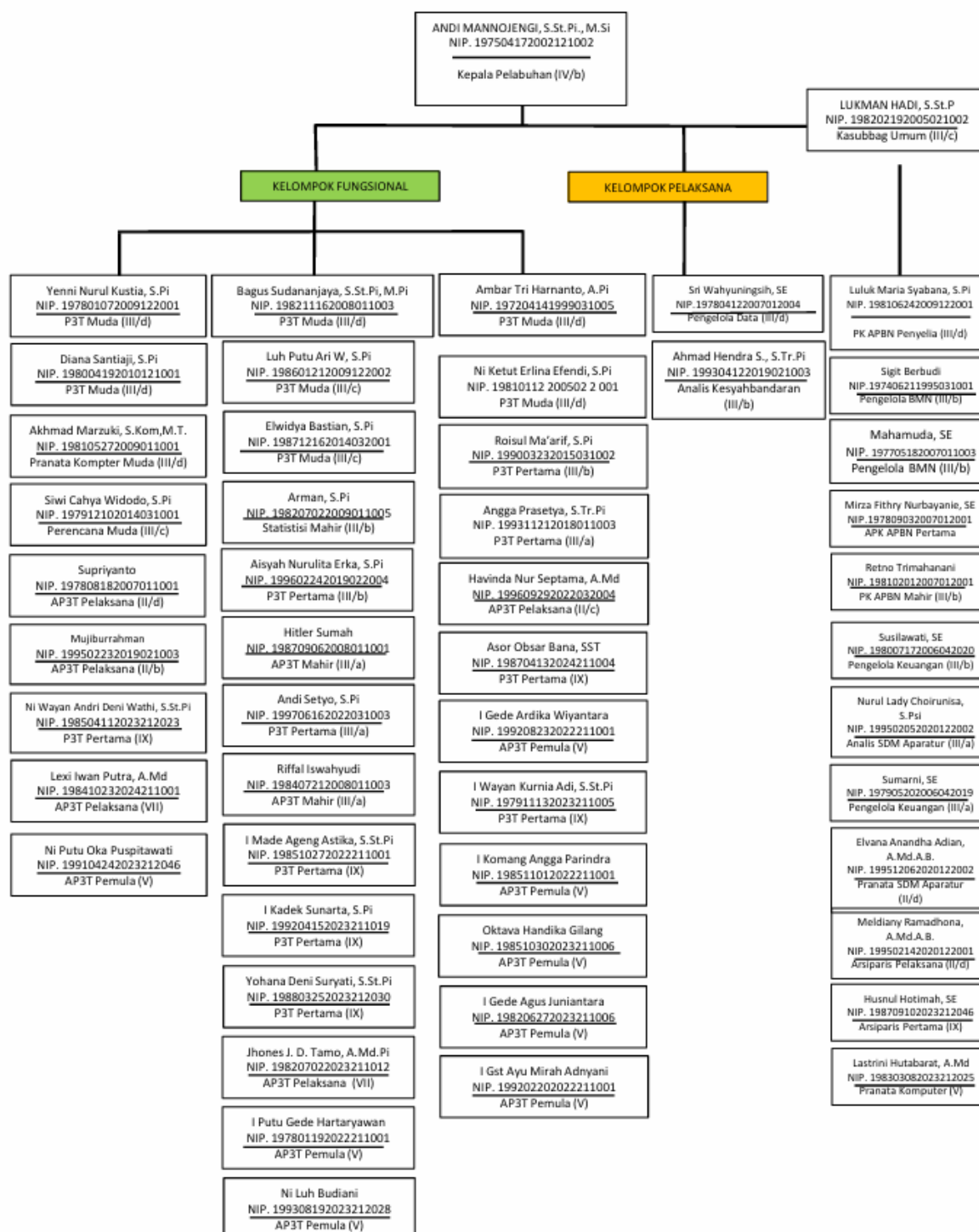
- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- Pelayanan Jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi di PPN Pengambengan terdiri dari :

- a. Kepala Pelabuhan
- b. Kepala Sub Bagian Umum
- c. Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan
- d. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
- e. Kelompok Kerja Kesyahbandaran

Secara singkat struktur organisasi PPN Pengambengan dapat disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pengembangan



Sejak tanggal 22 Oktober 2020 seluruh jajaran eselon IV diangkat menjadi Jabatan Fungsional melalui mekanisme Penyetaraan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 149/KP.930/PNY-JF/IX/2020 tanggal 29 September

2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke Dalam Jabatan fungsional dan masih melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan dalam tugas fungsi Subbag/Seksi sebagai Subkoordinator berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 192/KP.900/PNY-JF/X/2020 tanggal 22 oktober 2020 tentang Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional. Berdasarkan PermenPANRB No. 7 Tahun 2022 fungsi subkoordinator berubah menjadi tim kerja.

2.3. Komposisi Pegawai

Pegawai PPN Pengambangan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan outsorsing. Jumlah pegawai di PPN Pengambangan pada tahun 2024 adalah 128 orang dengan komposisi sebagaimana tabel 1

Tabel 1. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	35
2	PPPK	18
3	PPNPN	18
4	Outsorsing Pengolah Data	21
5	Outsorsing Satpam	18
6	Outsorsing Kebersihan	15
7	Outsorsing Pengemudi	3
Jumlah		128

2.4. Alokasi Anggaran

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun Anggaran 2024 melalui DIPA Nomor : SP DIPA – 032.03.2.633693/2024 tanggal 24 November 2023. memperoleh anggaran dana sebesar Rp. 15.094.595.000.- (Lima belas milyar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Komposisi anggaran PPN Pengambangan tahun 2024 sebagaimana tabel 2 dan tabel 3

Tabel 2. Pagu Anggaran DIPA TA 2024 berdasarkan jenis belanja

KODE	URAIAN	JUMLAH
51	Belanja Pegawai	6.912.206.000
52	Belanja Barang	7.730.090.000
53	Belanja Modal	1.801.363.000
TOTAL		16.443.659.000

Tabel 3. Pagu Anggaran DIPA TA 2024 berdasarkan jenis keluaran (output)

KODE	URAIAN	JUMLAH
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.925.943.000

2.5. Fasilitas dan Operasional

1. Fasilitas Pelabuhan

Dalam rangka menunjang operasional PPN Pengambengan tersedia fasilitas / sarana yang meliputi Fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang, seperti sebagaimana tabel 4.

Tabel 4. Fasilitas Pokok PPN Pengambengan

No	Jenis	Ukuran	Tahun Pembangunan	Kondisi
1	Areal Pelabuhan (Lahan)	13.5 Ha	2001	Baik
2	Dermaga	181 X 7 m	2001	retakrambut

3	Jetty (2 buah)	65 X 4 m	2001	Baik
4	Penahan Gelombang (Break water)	1.627 m1	2001	Baik
5	Kolam Pelabuhan (AlurPelayaran)	15,5 Ha	2001	pedangkalan
6	Jalan Lingkungan	13.815 m1	2001	adakerusakan
7	Drainase	1.738 m1	2001	Baik
8	Groin sisi kiri	350 m1	2018	penuhsedimen
9	Turap Beton	395 m1	2014	Baik
10	Groin sisi kanan	26 m1	2018	Baik

Tabel 5. Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan

No	Jenis	Ukuran	Thn Pembangunan	Kondisi
1	Gedung TPI 1	72 m2	2001	Rusak Ringan
2	Gedung TPI 2	320 m2	2001	Baik
3	Gedung TPI 3 (Pemda)	80 m2	2007	Rusak Ringan
4	Gedung TPI 4	889 m2	2018	Rusak Ringan
5	Kantor Pelabuhan 1	240 m2	2001	Baik
6	Gedung Pelayanan Terpadu	1170 m2	2022	Baik
7	Kantor Bina Mutu	152 m2	2001	Baik
8	Menara air	166 m3	2001	Baik
9	Bangsai perbaikan jaring	400 m2	2004	Baik
10	Rumah Dinas 1	102 m2	2001	Baik
11	Rumah Dinas 2	60 m2	2001	Baik
12	Rumah Dinas 3	96 m2	2001	Baik
13	Rumah Dinas 4	43 m2	2001	Baik
14	Gudang Arsip	30 m2	2001	Baik
15	SPBN	838 m2	2004	Baik
16	Instalasi Listrik	230 kVa	2001	Baik
17	Cold Storage	616 m2	2017	Baik
18	Shelter Nelayan	75 m2	2000	Rusak Berat

Tabel 6. Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan

No	Jenis	Ukuran	Thn Pembangunan	Kondisi
1	Balai pertemuan nelayan	204 m ²	2001	Baik
2	Tempat ibadah (pura)	145 m ²	2018	Baik
3	Musholla	98 m ²	2013	Baik
4	Pertokoan 1	1020 m ²	2006	Baik
5	Pertokoan 2	605 m ²	2021	Baik
6	Pertokoan 3	30 m ²	2020	Baik
7	Parkir 1 (Roda 2)	792 m ²	2020	Baik
8	Parkir 2 (Pegawai)	150 m ²	2023	Baik
9	Pos PNBK Pas Masuk	4 m ²	2007	Baik
10	Pos Satpam	16 m ²	2022	Baik
11	Kantor POLAIR	400 m ²	2007	Baik
12	Kantor KSOP	140 m ²	2007	Baik

2. Kapal Perikanan

PPN Pengambengan melaksanakan pelayanan kapal-kapal perikanan secara penuh di dua pelabuhan yaitu PPN Pengambengan dan PU. Benoa. Kapal-kapal yang berpangkalan di PPN Pengambengan berjumlah 625 unit yang didominasi oleh kapal-kapal berukuran < 5 GT sedangkan kapal-kapal yang berpangkalan di PU. Benoa berjumlah 726 unit dan didominasi oleh kapal-kapal yang berukuran di atas 100 GT. Data kapal-kapal perikanan yang berpangkalan di PU. Benoa dan PPN Pengambengan sebagaimana table 7 dan table 8.

Tabel 7. Jumlah kapal yang berpangkalan di PPN Pengambengan

No	Jenis alat tangkap	Ukuran (GT)	Jumlah (unit)
1	Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal	6 sd 30	81
2	Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	10 sd 30	5

3	Pancing ulur	< 5 GT	344
4	Jaring isang hanyut	< 5 GT	192
Jumlah			625

Tabel 8. Jumlah kapal yang berpangkalan di PU. Benoa

No	Jenis alat tangkap	Ukuran (GT)	Jumlah (unit)
1	Pancing cumi	20 s.d. 200	266
2	Rawai tuna	20 s.d. 200	247
3	Pukat cincin pelagis kecil	70 s.d. 250	51
4	Pengangkut	80 s.d. 410	69
5	Rawai dasar	30 s.d. 120	30
6	Pukat cincin pelagis besar	130 s.d. 200	32
7	Pancing ulur tuna	10 s.d. 80	86
8	Jaring insang hanyut	130 s.d. 200	13
10	Pancing ulur	10 s.d. 40	11
11	Jala jatuh berkapal	30 s.d. 150	7
12	Jaring insang tetap	130 s.d. 150	2
Jumlah			814

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan selanjutnya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 149/KP.930/PNY-JF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas ke Dalam Jabatan fungsional dan masih melaksanakan tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan dalam tugas fungsi Subbag/Seksi sebagai Subkoordinator dan selanjutnya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 192/KP.900/PNY-JF/X/2020 tanggal 22 oktober 2020 tentang Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional. Berdasarkan PermenPANRB No. 7 Tahun 2022 fungsi subkoordinator berubah menjadi tim kerja maka pada bab ini penyajian pelaksanaan program dan anggaran dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja.

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelabuhan

3.1.1. Publikasi Pelabuhan Perikanan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 259 ayat 2 bahwa Sistem Informasi Kepelabuhanan Perikanan meliputi aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dan aplikasi lain yang mendukung tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan yang saling terintegrasi.

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan menyebarkan informasi terkait aktivitas di pelabuhan perikanan. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi secara *real-time* kepada para pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pengusaha perikanan, dan pihak pemerintah. Melalui PIPP, data yang akurat dan terbaru terkait hasil tangkapan ikan, jumlah kapal yang beroperasi, cuaca, dan kondisi laut dapat dikumpulkan dan

diolah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan efisiensi operasional pelabuhan.

Selain itu, PIPP berfungsi sebagai pusat distribusi informasi yang dapat diakses melalui berbagai media, seperti situs web dan aplikasi, untuk menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, PIPP diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi operasional, mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Selain di PPN Pengambengan, PU. Benoa walaupun merupakan pelabuhan umum, namun sebagian besar kapal yang beroperasi di wilayah Benoa merupakan kapal perikanan yang mempunyai data dan informasi cukup penting. Oleh sebab itu sejak tahun 2018, kegiatan PIPP sudah aktif dilaksanakan. Ragam data yang dipublikasikan melalui aplikasi PIPP adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi Kunjungan Kapal

Kapal yang berkunjung ke PPN Pengambengan adalah kapal lokal Kabupaten Jembrana yang beroperasi di Selat Bali dengan menggunakan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan 2 Kapal dan Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan 1 Kapal serta kapal fiber berukuran < 5 GT dengan alat tangkap *gillnet* dan pancing ulur. Ikan hasil tangkapan dominan yaitu ikan lemuru, layang, tembang, tongkol, layur, dll. Data kunjungan kapal pada Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Data Frekuensi Kunjungan Kapal di PPN Pengambengan Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Kapal (Kali)
1	Januari	1038
2	Februari	859
3	Maret	824
4	April	430
5	Mei	617
6	Juni	755
7	Juli	677

8	Agustus	572
9	September	658
10	Oktober	640
11	Nopember	918
12	Desember	543
Jumlah		8.531

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa kunjungan kapal pada tahun 2024 sebanyak 8.531 kali. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan kapal mengalami peningkatan sebesar 47.5% dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan cuaca yang baik sehingga kapal fiber maupun kapal pukat cincin pelagis kecil banyak melakukan trip. dan karena kapal-kapal perikanan di PPN Pengambengan merupakan kapal dengan *one day trip*. sehingga jumlah kunjungan kapal cukup tinggi.

Karakteristik kunjungan kapal di PU. Benoa berbeda dibandingkan dengan di PPN Pengambengan. Kapal perikanan di PU. Benoa didominasi oleh kapal-kapal berukuran di atas 30 GT dengan alat tangkap dominan pancing cumi dan rawai tuna. Kunjungan kapal di PU. Benoa selama tahun 2024 sebagaimana tabel 10.

Tabel 10. Frekuensi kunjungan kapal di PU. Benoa tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Kapal (Unit)
1	Januari	80
2	Februari	89
3	Maret	119
4	April	88
5	Mei	127
6	Juni	156
7	Juli	178
8	Agustus	160
9	September	142
10	Oktober	94
11	November	74
12	Desember	175

Total	1482
-------	------

2. Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di PPN Pengambengan pada tahun 2024 mencapai 23.493 Ton. dengan hari kerja sebanyak 323 hari sehingga jika dirata-rata produksi PPN Pengambengan adalah 72.73 Ton/hari atau mengalami kenaikan sebesar 67% apabila di bandingkan dengan pendaratan ikan pada tahun 2023 sebesar 14.057 Ton dengan rata-rata produksi 50.38 ton/hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi di PPN Pengambengan diantaranya cuaca yang mendukung dan kemudahan nelayan mendapatkan BBM sehingga trip kapal perikanan juga meningkat.

Volume produksi selama tahun 2024 di PPN Pengambengan mengalami fluktuasi. hal ini dikarenakan adanya faktor cuaca yang kurang mendukung pada bulan April sehingga mempengaruhi hasil tangkapan. sedangkan mulai bulan September sampai dengan Desember 2024. volume produksi meningkat seiring cuaca yang semakin membaik. Adapun produksi ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2024 sebagaimana tabel 11.

Tabel 11. Pendaratan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Ikan Yang Didaratkan (ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)
1	Januari	3.187	13.680.377
2	Februari	2.449	11.182.439
3	Maret	2.015	9.799.285
4	April	1.053	5.571.844
5	Mei	938	6.558.480
6	Juni	1.515	9.597.978
7	Juli	1.317	6.931.236
8	Agustus	1.188	6.743.231
9	September	1.928	8.341.150
10	Oktober	2.032	7.511.609
11	Nopember	3.727	16.077.248

12	Desember	2.144	8.439.930
Total		23.493	110.434.805

Data produksi perikanan tangkap di PU Benoa semakin membaik seiring dengan pelaksanaan PNPB Pasca Produksi dan perbaikan-perbaikan sistem pendataan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data yang dihimpun produksi hasil tangkapan di PU benoa 45.185 ton pada tahun 2024.

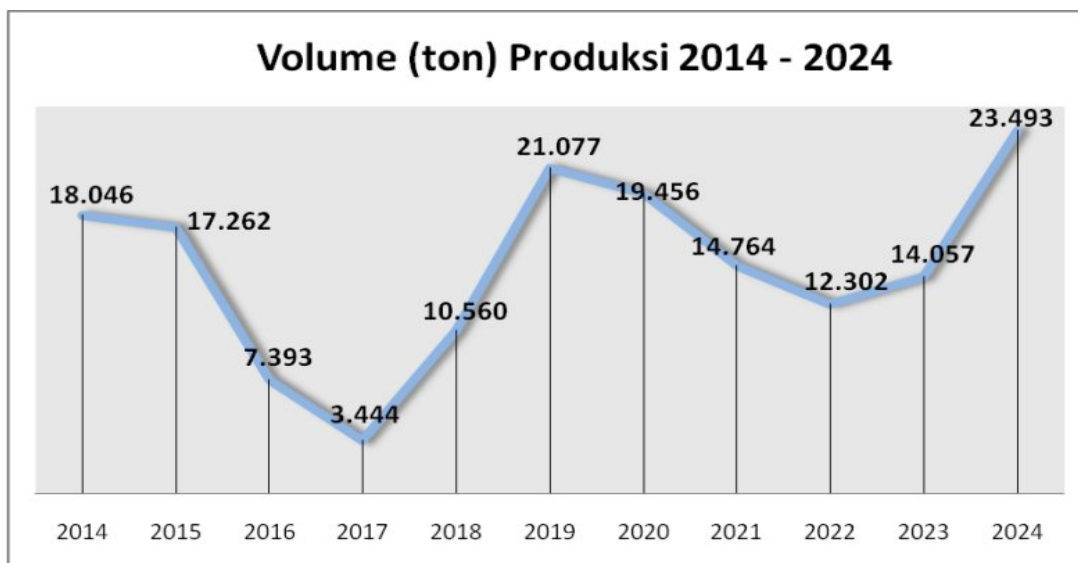
Tabel 12. Pendaratan Ikan di PU. Benoa Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pendaratan	Produksi (kg)
1	Januari	80	2.908.628
2	Februari	89	4.135.463
3	Maret	119	3.519.513
4	April	88	3.434.501
5	Mei	127	3.151.484
6	Juni	156	3.057.109
7	Juli	178	3.730.838
8	Agustus	160	3.555.576
9	September	142	3.221.224
10	Oktober	94	4.751.936
11	November	74	4.156.222
12	Desember	175	5.562.443
Total		1.482	45.184.938

3. Tren Produksi Tangkapan Ikan

Tren produksi tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam periode 10 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Produksi mencapai puncak tertinggi pada tahun 2024 dan jumlah nilai produksi terendah pada tahun 2017. Trend Produksi PPN Pengambengan Tahun 2014 sampai dengan 2024. dapat dilihat pada Grafik 1 berikut.

Grafik 1. Trend Produksi PPN Pengambengan tahun 2014 – 2024

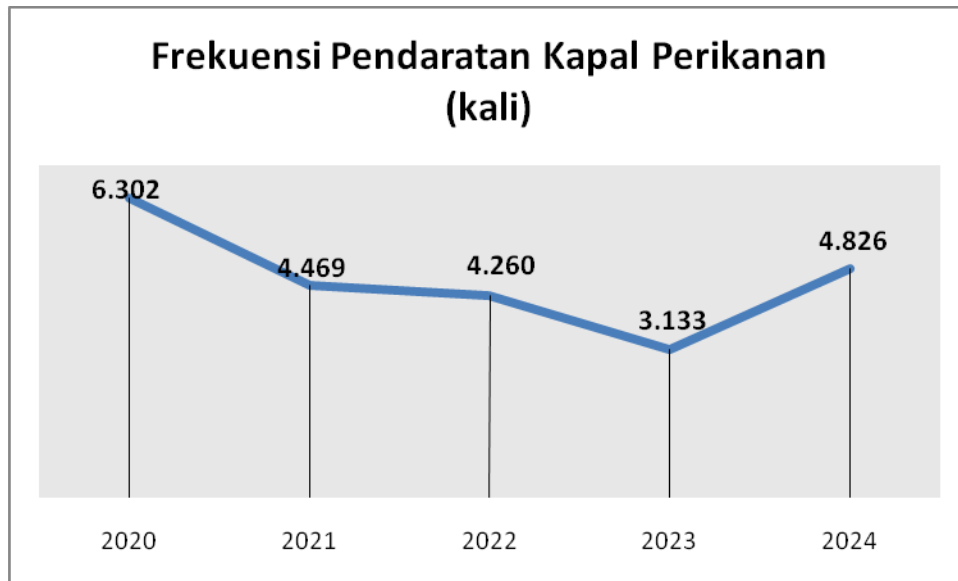


Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13. Volume produksi di PPN Pengambengan Tahun 2020 – 2024

No.	Bulan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	389	561	542	204	3.187
2	Februari	592	779	1.213	84	2.449
3	Maret	943	1.168	1.287	37	2.015
4	April	4.190	1.506	1.626	44	1.053
5	Mei	1.268	1.003	1.076	175	938
6	Juni	1.646	552	993	764	1.515
7	Juli	1.106	1.003	551	356	1.317
8	Agustus	1.486	196	1.072	646	1.188
9	September	1.767	1.499	1.548	1.696	1.928
10	Oktober	1.671	3.598	956	1.789	2.032
11	Nopember	1.881	1.492	856	3.122	3.727
12	Desember	2.506	1.413	584	5.142	2.144
Total		19.456	14.764	12.302	14.057	23.493

Grafik 2. Frekuensi Pendaratan ikan di PPN Pengambengan tahun 2020 – 2024



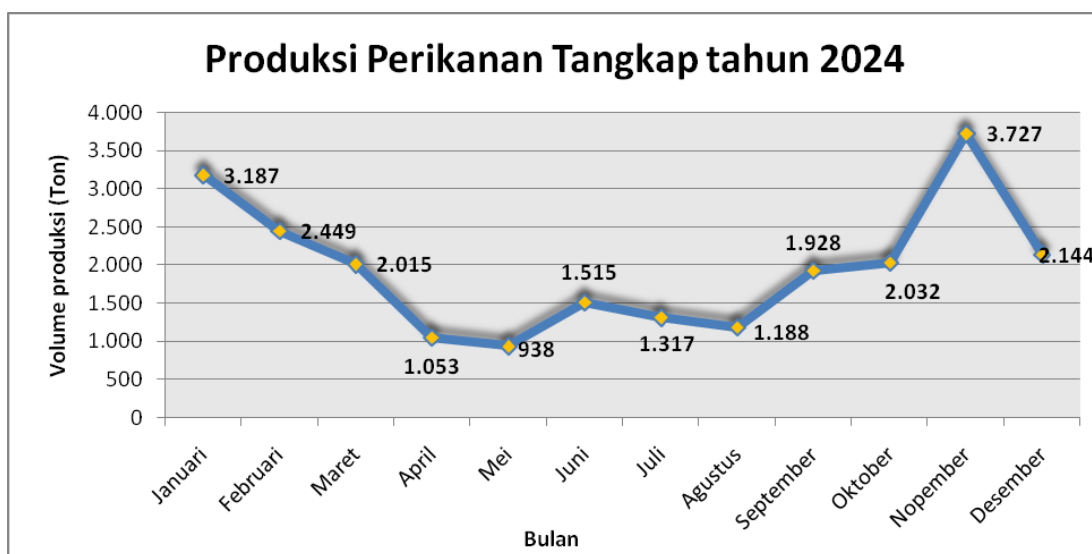
Jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan adalah lemuru, layang deles, tembang, tongkol pisang cerutu, layur dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didaratkan di PPN Pengambengan khususnya ikan lemuru digunakan sebagai bahan baku ikan kaleng dan tepung ikan di pabrik-pabrik pengolahan yang ada di sekitar PPN Pengambengan dan dikirim keluar daerah sebagai bahan baku industri pengolahan ikan. Jumlah ikan yang didaratkan dan dominan di PPN Pengambengan pada Tahun 2024 disajikan pada tabel 14 . Grafik 3 dan Grafik 4.

Tabel 14. Jumlah Ikan Yang Didaratkan di PPN Pengambengan Tahun 2024 (Per jenis Ikan)

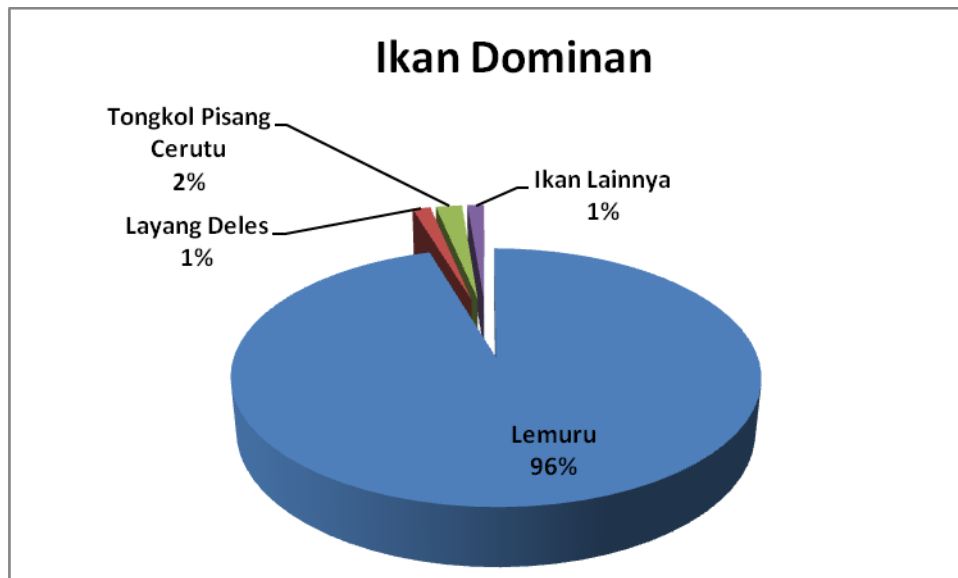
NO	BU LAN	VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PER JENIS IKAN												TOTA L PROD UKSI (TON)	TOTAL NILAI (RP. 1000)
		LEMURU		LAYANG DELES		TEMBANG		TONGKOL PISANG CERUTU		LAYUR		LAINNYA			
		PROD (TON)	NILAI	PRO D (TO N)	NILAI	PROD (TON)	NILAI	PROD (TON)	NIL AI	PROD (TON)	NIL AI	PRO D (TO N)	NILAI		
1	JAN	2.974	12.359.561	82	507.431	3.7	15.744	124	756.650	0.32	13.805	2	27.186	3.187	13.680.377
2	FEB	2.188	9.411.524	53	304.748	0	0	153	874.932	0.95	42.950	55	548.285	2.449	11.182.439
3	MAR	1.930	9.073.122	9	81.293	4	23.506	71	589.013	0.51	21.500	0.94	10.851	2.015	9.799.285
4	APR	997	4.794.381	4	24.762	0	0	5	38.276	0	0	48	714.425	1.053	5.571.844
5	MEI	687	4.582.522	91	547.17	0	0	98	718.	0.10	5.00	62	704.98	938	6.558.480

					7				795		0		6		
6	JUN	1.475	9.144.086	26	210.270	0	0	4	48.354	0	0	10	195.268	1.515	9.597.978
7	JUL	1.267	6.444.830	26	163.638	0.18	900	9	81.443	0.39	13.915	15	226.510	1.317	6.931.236
8	AGU	1.138	6.249.241	14	98.665	0	0	0.85	11.375	0	0	36	383.951	1.188	6.743.231
9	SEP	1.874	7.895.587	14	118.939	0	0	0.15	2.452	0.61	28.440	39	295.732	1.928	8.341.150
10	OKT	2.024	7.371.798	2	22.742	0	0	0.65	8.068	1.78	70.813	3	38.188	2.032	7.511.609
11	NOP	3.710	15.642.054	1	11.933	0	0	2	24.831	7.04	329.786	6	68.644	3.727	16.077.248
12	DES	2.143	8.380.973	0	2.070	0	0	0	0	0.91	48.310	0.59	8.577	2.144	8.439.930
TOTAL		22.407	101.349.678	322	2.093.668	8	40.150	466	3.154.189	13	574.519	277	3.222.602	23.493	110.434.805

Grafik 3. Produksi Perikanan Setiap Bulan di PPN Pengambengan Tahun 2024



Grafik 4. Jenis ikan dominan yang di daratkan di PPN Pengambangan Tahun 2024



Jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan pada 2024 yakni lemuru sebesar 96%. tongkol pisang cerutu 2%. dan layang deles 1%. Berdasarkan dari grafik diatas jenis ikan yang paling dominan tertangkap yaitu ikan lemuru dengan total hasil tangkapan sebesar 22.407 ton. Produksi ikan lemuru pada tahun 2024 ini meningkat daripada tahun 2023 yang hanya sebesar 61% atau 8.570 ton dari total hasil tangkapan. Jenis ikan yang termasuk dalam ikan lainnya yaitu ikan layur. tembang. kembung. peperek. selengseng. pilok. kenyar. marmoyo. selar. cumi-cumi. lemadang. lele laut. dan sunglir.

4. Perbekalan

a. Penyaluran Es

Ikan merupakan komoditas yang mudah busuk jika tidak dilakukan penanganan dengan cepat dan tepat. Penanganan produk perikanan dengan sistem rantai dingin yang menggunakan es untuk mempertahankan mutu ikan dalam proses penangkapan dan distribusi harus mendapat perhatian. mengingat terbatasnya pengetahuan nelayan dan masyarakat perikanan tentang penanganan produk hasil perikanan yang baik. Jika es yang digunakan tidak sesuai standar mutu, maka akan berakibat pada menurunnya mutu ikan. Dengan menurunnya mutu, maka akan berpengaruh pada distribusi ikan pada perusahaan pengalengan

yang ada di sekitar PPN Pengambengan. Karena saat ini nelayan masih berorientasi pada kuantitas hasil tangkapan bukan pada kualitas hasil tangkapan sehingga sangat merugikan nelayan dan pendistribusi ikan itu sendiri.

Penyaluran es di PPN Pengambengan dilakukan oleh penyuplai-penyuplai es di sekitar PPN Pengambengan dan dari luar daerah. Penyaluran es pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Penyaluran Es di PPN Pengambengan Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Penyaluran Es (Ton)
1	Januari	449
2	Februari	366
3	Maret	354
4	April	193
5	Mei	237
6	Juni	283
7	Juli	278
8	Agustus	265
9	September	258
10	Oktober	193
11	Nopember	289
12	Desember	190
Jumlah		3.356

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat bahwa penyaluran es tahun 2024 sebanyak 3.356 ton. mengalami penurunan 3.403 ton dari penyaluran Es tahun 2023 sebesar 6.759 ton. Jika dipersentasekan jumlah penyaluran es mengalami penurunan sebesar 50 % dari tahun sebelumnya. Penurunan pada kegiatan penyaluran es di PPN Pengambengan disebabkan adanya permintaan tepung ikan yang meningkat sehingga banyak ikan hasil tangkapan yang kualitas rendah tidak perlu dilakukan penanganan pasca produksi dengan baik. karena nantinya ikan tersebut akan diolah menjadi tepung ikan. dan juga salah satu

penyebab penurunan penyebaran es juga di karenakan lama berlayarnya para nelayan hanya tidak lebih dari 24 jam (*one day fishing*). Melalui sosialisasi terkait penanganan ikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan selalu mendorong para nelayan untuk selalu meningkatkan minat nelayan dalam menjaga kualitas/mutu ikan hasil tangkapan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ke depan nelayan lebih dapat meningkatkan kualitas mutu hasil ikan tangkapannya dengan membawa jumlah es yang sesuai dengan jumlah hasil tangkapan maksimal. Sosialisasi terkait penanganan ikan yang baik perlu tetap dilaksanakan untuk nelayan sehingga nelayan semakin memahami tentang pentingnya kualitas atau mutu ikan.

b. Penyaluran Bahan Bakar Minyak

Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kegiatan operasional kapal perikanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha perikanan. Penyaluran BBM Solar di PPN Pengambangan dilakukan oleh PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambangan. Pada tahun 2023 penyaluran BBM Solar sebanyak 2.518.78 ton/tahun atau 209.89 ton/bulan. Sedangkan volume BBM Solar yang disalurkan oleh PT. Dua Berjaya di PPN Pengambangan pada Tahun 2024 adalah disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Volume penyaluran BBM Solar oleh PT. Dua Berjaya Tahun 2024

No.	Bulan	Volume BBM Solar (Liter)
1	Januari	254.876
2	Februari	254.884
3	Maret	254.884
4	April	216.331
5	Mei	229.210
6	Juni	254.335
7	Juli	244.524
8	Agustus	281.470

9	September	254.979
10	Oktober	255.082
11	Nopember	254.520
12	Desember	224.748
Jumlah		2.748.836

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan untuk Penyaluran BBM Solar hanya bisa mendata penyaluran dari SPBN PT. Dua Berjaya yang berada di kawasan PPN Pengambengan. sedangkan penyaluran melalui pembelian dari SPBU di luar PPN Pengambengan tidak terdata.

c. Pemasaran

Distribusi hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dilakukan di Dalam Propinsi maupun di Luar Propinsi yakni Jembrana, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB. Adapun jumlah hasil tangkapan yang didistribusikan di dalam Propinsi sebesar 21.306 Ton sedangkan yang di Luar Propinsi sebesar 484 Ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Distribusi Hasil Tangkapan Di PPN Pengambengan Tahun 2024

No	Bulan	Distribusi		Tujuan
		Dalam Propinsi (Ton)	Luar Propinsi (Ton)	
1.	Januari	3169	-	Jembrana
2.	Februari	2411	-	Jembrana
3.	Maret	2015	-	Jembrana
4.	April	1032	-	Jembrana
5.	Mei	871	-	Jembrana
6.	Juni	942	-	Jembrana
7.	Juli	1317	-	Jembrana
8.	Agustus	950	-	Jembrana

9.	September	1864	-	Jembrana
10.	Oktober	1889	-	Jembrana
11.	Nopember	3213	-	Jembrana
12.	Desember	1634	484	Jembrana. Jawa Timur
Jumlah		21.306	484	

3.1.2. Statistik Perikanan Tangkap

PPN Pengambengan memiliki komitmen untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Untuk mendapatkan data yang berkualitas, serangkaian proses harus dilaksanakan, mulai dari pemahaman materi, pelaksanaan pengumpulan data, pemeriksaan data, proses pengolahan dan pengiriman data. Rangkaian proses tersebut harus dilakukan dengan benar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan Laporan Statistik yang benar dan akurat, maka disusunlah Laporan Statistik Bulanan yang berisi data produksi perikanan tangkap yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 45 tahun Tahun 2009 tentang Perikanan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pengelolaan data produksi perikanan tangkap ini disusun secara berkala dibuat dalam setiap bulan yang digunakan sebagai bahan penyusunan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tangkap yang akan datang.

Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan, dan untuk produksi pada tahun 2024 adalah sebanyak 23.493 Ton, sedangkan produksi pada tahun 2023 adalah sebanyak 14.057 Ton, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 67%. Produksi di PPN Pengambengan pada Tahun 2024 bersumber dari hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan, total kegiatan pendaratan ikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 4.826 kali (Trip) dengan jumlah fisik kapal yang melakukan bongkar hasil tangkapan terbanyak pada bulan November yaitu sebanyak 192 unit kapal dengan alat tangkap yang digunakan yaitu pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring insang hanyut atau jaring gillnet oseanik dan pancing ulur.

Adapun ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Pengambengan tahun 2024 bisa dilihat pada tabel 18 berikut ini.

Tabel 18. Statistik hasil tangkapan berdasarkan jenis ikan

NO.	JENIS IKAN	TOTAL (KG)
1	Lemuru	22.407.747
2	Layang Deles	321.925
3	Tembang	8.158
4	Tongkol Pisang Cerutu	467.245
5	Layur	11.703
6	Teri	132
7	Selar Bentong	148
8	Kembung	1.412
9	Layang Anggur	16.667
10	Layang Benggol	18.954
11	Talang-talang	65
12	Tetengkek	819
13	Semar	12.062
14	Tongkol Banyar (KAW)	25.621
15	Kenyar	107.451
16	Selengseng	71.009
17	Lemadang	19
18	Marlin/Setuhuk Hitam	53
19	Marmoyo/Kwe/Padi-padi	289
20	Pari	4
21	Peperek/Petek	4.201
22	Kurisi	160
23	Alu-alu/Barakuda	130
24	Kerong-kerong	1.995
25	Sunglir	120
26	Kerapu Karang	105
27	Cumi-cumi	4.512
28	Manyung/Lele Laut	10.504
29	Kakap Merah	12

Dari tabel diatas kita bisa lihat jumlah produksi terbanyak adalah ikan lemuru sebesar 22.408 Ton, tongkol pisang cerutu sebesar 467 Ton, dan layang deles sebesar 322 Ton. Rincian statistik perikanan tangkap PPN Pengambengan tahun 2024 sebagaimana tabel 19.

Tabel 19. Rekap data statistik PPN Pengambengan Tahun 2024

BULAN	HASIL VALIDASI				
	JUMLAH FISIK KAPAL BONGKAR	JUMLAH TRIP	VOLUME (Ton)	NILAI (Rp. 1000)	Harga Rata-Rata (Rp)
Januari	113	562	3187	13.680.377	4293
Februari	113	419	2449	11.182.439	4567
Maret	88	325	2015	9.799.285	4863
April	56	187	1053	5.571.844	5291
Mei	127	323	938	6.558.480	6992
Juni	182	447	1515	9.597.978	6334
Juli	112	339	1317	6.931.236	5264
Agustus	73	248	1188	6.743.231	5676
September	76	293	1928	8.341.150	4325
Oktober	140	478	2032	7.511.609	3696
November	196	773	3727	16.077.248	4314
Desember	163	443	2144	8.439.930	3936
Total	1439	4.837	23.493	101.434.805	4701

Dari tabel diatas bisa kita lihat Jumlah fisik kapal bongkar di PPN Pengambengan terbanyak ada di bulan November. untuk total trip selama tahun 2024 yaitu sebesar 4.837 kali (Trip). Untuk Volume Produksi terbanyak yaitu di bulan November yaitu sebesar 3.727 Ton dengan total Nilai Produksi sebesar Rp. 16.077.248.000.00.

3.1.3. Pelayanan Mutu Hasil Tangkapan

1. Pelayanan Inspeksi Pengendalian Mutu (IPM) dan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (SCPIB)

Ikan merupakan bahan makanan yang sangat mudah rusak. Perubahan biokimia pada tubuh ikan dimulai segera setelah ikan mati dan pada akhirnya

akan menyebabkan pembusukan dan penurunan kualitas. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kualitas ikan sesegera mungkin setelah ikan ditangkap. Salah satu tahapan kritis yang menyebabkan penurunan kualitas ikan adalah tahapan antara penangkapan sampai pendaratan ikan. Teknik penangkapan ikan di atas kapal dan penanganan pada tahapan kritis tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas ikan yang akan sampai di konsumen akhir.

Kepmen 01/MEN/2007 tentang persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi, menjelaskan bahwa kapal penangkap dan pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan dan penanganan ikan diatas kapal harus memenuhi persyaratan ketentuan sanitasi dan hygiene di kapal perikanan.

Kapal Penangkap dan Pengangkut ikan (SKP Kapal) untuk seluruh kapal-kapal perikanan serta Inspeksi Pembongkaran di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh petugas pelabuhan perikanan untuk setiap kapal. Sebagai mandat tersebut, maka Dirjen Perikanan Tangkap mengeluarkan Nomor 264/DPT.0/PI.540.S4/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan dan nomor 265/DPT.0/PI.540.S4/I/2009 tentang pembentukan tim pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

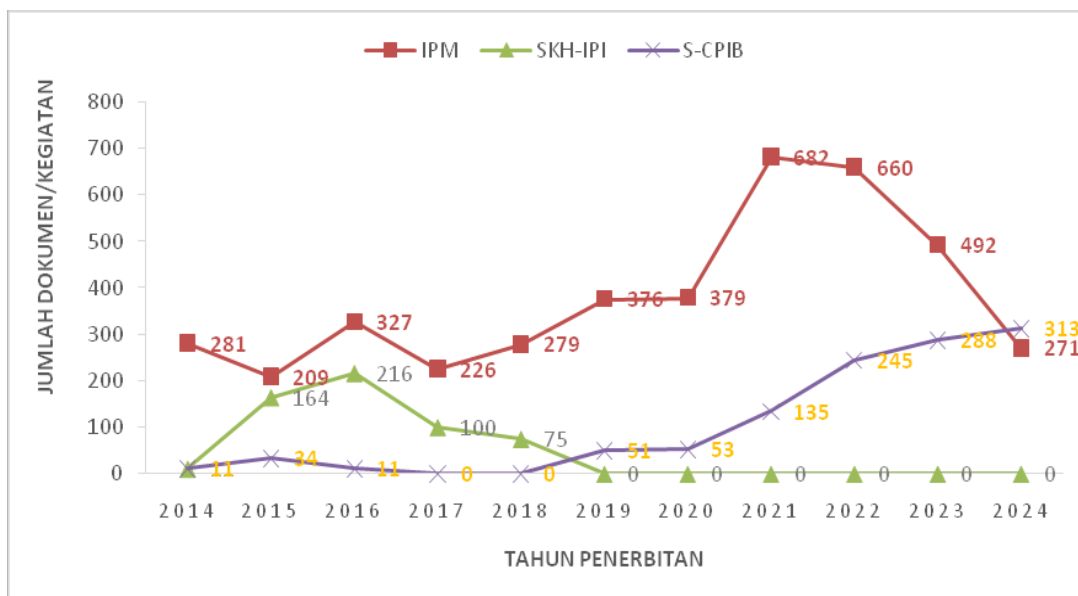
Hal ini terkait juga dengan salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai “Pusat Pelayanan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan”. Namun sebagian besar pelabuhan perikanan masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi tersebut. Dalam rangka mewujudkan fungsi pelabuhan perikanan sebagai pusat pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan, diantaranya dengan melaksanakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Inspeksi Pembongkaran Ikan.

Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik mengamanatkan bahwa kegiatan inspeksi pembongkaran ikan merupakan salah satu point utama dari inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Penerbitan dokumen yang di terbitkan PPN Pengambengan selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel 20 dan grafik 5.

Tabel 20. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB

Tahun	IPI	SKH-IPI	S-CPIB
2014	281	11	11
2015	209	164	34
2016	327	216	11
2017	226	100	0
2018	279	75	0
2019	376	0	51
2020	379	0	53
2021	682	0	135
2022	660	0	245
2023	492	0	288
2024	271	0	313

Grafik 5. Jumlah Penerbitan Dokumen IPI, SKH-IPI dan S-CPIB



Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan sudah mulai dicanangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2012, namun pelaksanaannya di PPN Pengambengan dan Pelabuhan Umum Benoa baru berjalan tahun 2014. Saat ini pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu (IPM) belum bisa dilaksanakan terhadap seluruh kapal yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan sehingga inspeksi dilaksanakan secara sampling.

Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) sudah tidak diterbitkan mulai tahun 2019. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 7/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, dimana Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) sudah tidak menjadi syarat dalam penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB).

Adapun beberapa temuan yang sering terjadi selama proses inspeksi pembongkaran ikan di Pelabuhan Umum Benoa, antara lain :

1. Proses pembongkaran dilakukan dengan cepat terkadang kurang hati-hati, ada beberapa ikan yang terjatuh. Namun karena ikan hasil tangkapannya berupa ikan beku, maka tidak terlalu berpengaruh nyata terhadap penurunan kualitas ikan;

2. Permukaan kapal yang bersentuhan langsung dengan ikan masih terbuat dari bahan yang tidak kedap air (bahan terbuat dari kayu) sehingga dapat merusak suhu ikan yang bersentuhan langsung dengan ikan;
3. Proses bongkar dilakukan pada siang hari dan tanpa menggunakan selasar, yang mengakibatkan ikan terpapar sinar matahari secara langsung dan menyebabkan terjadinya penurunan mutu pada hasil tangkapan;
4. Masih banyak ditemukan ABK ataupun petugas bongkar yang merokok, menginjak ikan, akan/minum dan/atau meludah pada saat proses bongkar ikan dilakukan.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) merupakan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan, penanganan dan penyimpanan ikan di atas kapal. Kapal penangkap dan pengangkut ikan memperoleh sertifikat CPIB setelah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 7/PER-DJPT/2019 tentang Persyaratan Pengendalian Mutu dan Tata Cara Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kegiatan Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan mengajukan permohonan Sertifikasi CPIB kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, menggunakan formulir permohonan Sertifikasi CPIB dan dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIPI/SIKPI)
 - b. Sertifikat Kelayakan fasilitas;
 - c. Sertifikat awak kapal
 - d. Hasil Inspeksi pembongkaran ikan dengan nilai baik.
2. Tim verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah dokumen diterima.

3. Apabila persyaratan dokumen belum lengkap, maka pemilik kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan diberitahu melalui surat untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
4. Kepala Pelabuhan Perikanan menerbitkan sertifikat CPIB paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.

PPN Pengambengan berupaya memberikan pelayanan penerbitan SCPIB baik di PPN Pengambengan maupun di PU. Benoa. Jumlah penerbitan SCPIB PPN Pengambengan sebagaimana tabel 21.

Tabel 21. Jumlah Sertifikat CPIB yang telah diterbitkan

Tahun	Jumlah S-CPIB
2014	11
2015	34
2016	11
2017	0
2018	0
2019	51
2020	53
2021	135
2022	245
2023	288
2024	313
Jumlah	1.141

Hingga saat ini, PPN Pengambengan telah menerbitkan 1.141 lembar Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) di atas kapal penangkap dan pengangkut ikan. S-CPIB merupakan suatu jaminan mutu terhadap ikan yang ditangkap oleh kapal perikanan dan tentunya dengan jaminan mutu tersebut akan meningkatkan nilai jual ikan.

3.1.4. Pelayanan Dokumen Persyaratan Ekspor

1. Penerbitan *Catch Documentation Scheme of The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CDS CCSBT)*

Salah satu tindakan pengelolaan berkelanjutan yang telah disepakati difokuskan pada pengumpulan data ikan hasil tangkapan tuna sirip biru selatan (*Southern Bluefin Tuna*). Untuk maksud tersebut, CCSBT telah menerbitkan *Resolution on the Implementation of a CDS to record all catch of SBT*, dimana CCSBT akan menerapkan *Catch Documentation Scheme (CDS)* dalam perdagangan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*).

Guna mewujudkan komitmen diatas, berbagai negara telah bersepakat membentuk organisasi internasional atau regional yang berkewajiban melakukan pengelolaan *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, yang pembentukannya didasarkan pada UNCLOS 1982. Saat ini, terdapat 5 (lima) organisasi internasional dan regional untuk mengelola *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, yaitu :

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*
2. *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*
3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*
4. *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*
5. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)*.

Berdasarkan adanya kebutuhan perluasan wilayah penangkapan ikan bagi armada perikanan Indonesia dan potensi sumberdaya ikan *straddling fish stock and highly migratory fish stock* di laut lepas, hingga saat ini, Indonesia telah menjadi peserta pada organisasi regional pengelola sumberdaya ikan (*Regional Fisheries Management Organisations*) sebagai berikut :

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, dengan status sebagai anggota tetap sejak 9 Juli 2007;
2. *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* dengan status sebagai anggota tetap sejak 8 April 2008, dan
3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*, dengan status sebagai *Cooperating Non-Member (CNM)* sejak tahun 2006.

Salah satu tindakan pengelolaan berkelanjutan yang telah disepakati difokuskan pada pengumpulan data ikan hasil tangkapan tuna sirip biru selatan (*Southern Bluefin Tuna*). Untuk maksud tersebut, CCSBT telah menerbitkan *Resolution on the Implementation of a CDS to record all catch of SBT CCSBT* yang diadopsi pada CCSBT-12 tahun 2005 dan CCSBT-13 Tahun 2006. serta telah dimodifikasi tanggal 19 Oktober 2009. dimana CCSBT akan menerapkan *Catch Documentation Scheme* (CDS) dalam perdagangan Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin Tuna*). *Catch Documentation Scheme* (CDS) terdiri dari 3 (tiga) formulir yang wajib disertakan dalam setiap perdagangan *Southern Bluefin Tuna*. sebagai berikut :

- a. *Catch Tagging Form* yaitu Formulir Penandaan Ikan Hasil Tangkapan. yang harus diisi oleh Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (*Fishing Master*) segera setelah ikan tertangkap.
- b. *Catch Monitoring Form* yaitu Formulir Pemantauan Ikan hasil Tangkapan. yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan/eksportir.
- c. *Re-Export/Export After Landing of Domestic Product Form* yaitu Formulir Ekspor Ulang/ Ekspor Setelah Pendaratan Produk Domestik. yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan/eksportir.

Kebijakan penerapan CDS diatas efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. dengan kata lain bahwa setiap kegiatan ekspor atau impor SBT mulai tanggal 1 januari 2010. hanya dapat dilaksanakan bilamana telah dilengkapi dengan 3 (tiga) formulir tersebut. Khusus formulir *Catch Monitoring Form* dan *Re-Export/Export After Landing of Domestic Product* wajib disahkan (divalidasi) oleh Petugas Pemerintah pada instansi yang berwenang.

Untuk memperlancar aktifitas ekspor SBT ke negara tujuan. perlu diperhatikan bahwa *Catch Tagging Form* dan *Catch Monitoring Form* harus disertakan pada setiap ikan hasil tangkapan yang berasal dari 1 (satu) kapal penangkap ikan.

Tabel 22. Data Penerbitan CDS CCSBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

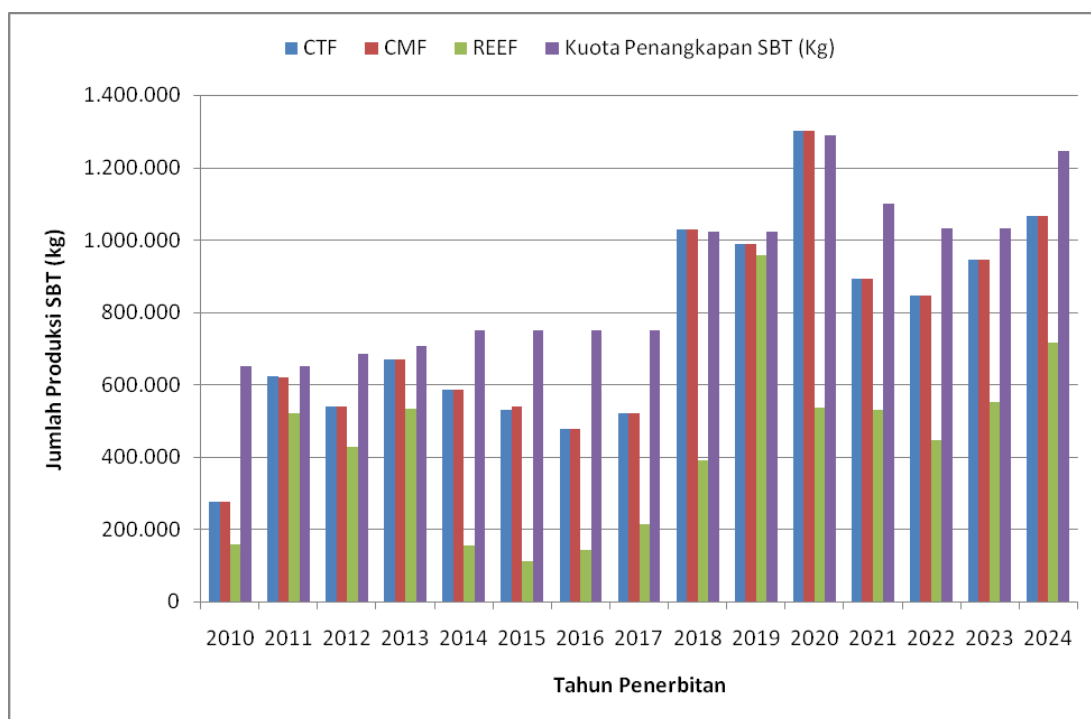
Tahun	CTF		CMF		REEF		Kuota Penangkapan SBT (Kg)
	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (kg)	
2010	251	277.039	251	276.384	198	157.100	651.000
2011	967	621.579	967	619.830	963	519.232	651.000
2012	916	540.325	916	540.325	916	426.594	685.000
2013	624	668.685	624	668.685	624	532.469	707.000
2014	800	586.945	800	586.945	154	155.783	750.000
2015	488	529.787	490	537.513	66	111.704	750.000
2016	375	477.445	375	477.111	64	143.783	750.000
2017	259	519.802	259	519.802	97	212.655	750.000
2018	312	1.029.274	312	1.029.274	173	391.488	1.023.000
2019	362	987.726	362	987.726	272	957.430	1.023.000
2020	392	1.300.052	398	1.300.052	303	536.367	1.290.000
2021	330	892.633	330	892.633	308	528.758	1.100.000
2022	493	846.875	493	846.875	306	445.637	1.031.483
2023	865	946.142	865	946.142	550	551.653	1.031.483
2024	1.050	1.064.542	1.050	1.064.542	674	716.997	1.244.683

Southern Bluefin Tuna yang keberadaannya sudah mendekati tingkat kepunahan. maka setiap tahun forum *Scientific Committee* CCSBT melakukan rapat tahunan untuk menentukan tingkat kelestarian SBT dan menentukan jumlah SBT yang boleh ditangkap dalam tiap tahunnya. Jumlah penentuan kuota setiap negara dipertimbangkan dari laporan data statistik negara terkait dan laporan *Scientific Committee* CCSBT terkait dengan keadaan sediaan SBT. Kuota penangkapan SBT yang diperoleh Indonesia hanya sekitar 6-7% dari total alokasi kuota dunia..

Kuota penangkapan SBT didistribusikan oleh Direktorat Sumber Daya Ikan DJPT KKP kepada asosiasi-asosiasi penangkapan ikan di Indonesia yang hasil tangkapannya di dominasi oleh ikan-ikan pelagis besar. Pada tahun 2023 kuota SBT di Pelabuhan Umum Benoa dibagikan kepada 2 asosiasi yaitu Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) dan Asosiasi Perikanan Terpadu (ASPRTADU). Untuk pengawasan pemakaian kuota ini. pihak Direktorat SDI

DJPT KKP mengembangkan aplikasi CDS CCSBT sehingga mempermudah petugas verifikator di Pelabuhan untuk pengawasannya.

Grafik 6. Data Penangkapan dan Ekspor SBT di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa



Apabila dilihat pada Grafik 6 diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah SBT yang ditangkap dan dilaporkan melalui *Catch Tagging Form* (CTF) sebesar 1.064.542 kg. Dari sejumlah *Southern Bluefin Tuna* (SBT) yang dilaporkan melalui CTF, sejumlah 49.652 kg SBT dilaporkan diekspor dalam kondisi *fresh* dan untuk pasar domestik (*reject*) sejumlah 1.014.890 kg. Dari sejumlah SBT untuk pasar domestik tersebut sejumlah 716.997.96 kg diekspor dan dilaporkan melalui dokumen REEF. *Southern Bluefin Tuna* (SBT) diekspor melalui dokumen REEF dalam kondisi *frozen*. Sehingga total SBT yang diekspor sejumlah 766.649.96 kg. *Southern Bluefin Tuna* (SBT) yang diekspor dalam kondisi *fresh* ditujukan ke negara Jepang dan yang diekspor dalam kondisi *frozen* ditujukan ke negara USA, Jepang, Hongkong, Canada, China, Thailand, Philippines, Lebanon, Saudi Arabia, dan Vietnam.

2. Pelayanan Penerbitan *The Indian Ocean Tuna Commission* (CDS IOTC) *Statistical Document for Big Eye Tuna* dan *The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna* (CDS ICCAT) *Statistical Document for Swordfish*

Sesuai dengan Resolusi *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) Nomor 01/06 Concerning IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document Program*, telah diterapkan formulir IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document* dalam setiap perdagangan jenis ikan yang dikelola IOTC utamanya jenis tuna mata besar (*bigeye tuna*). Terdapat 2 (dua) jenis formulir yang harus disertakan dalam setiap kegiatan ekspor atau impor tuna mata besar (*bigeye tuna*) sebagai berikut :

1. IOTC *Bigeye Tuna Statistical Document (Export)* yaitu Dokumen Statistik Tuna Mata Besar yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan atau eksportir, dan
2. IOTC *Bigeye Tuna Re-Export Certificate* yaitu Sertifikat Ekspor Ulang (Re-Export) Tuna Mata Besar, yang harus diisi oleh perusahaan penangkapan ikan atau eksportir.

Dengan penerapan resolusi IOTC diatas, maka setiap kegiatan ekspor atau impor tuna mata besar (*bigeye tuna*), hanya dapat dilaksanakan bilamana telah dilengkapi dengan formulir tersebut dan masing-masing formulir wajib disahkan (divalidasi) oleh Petugas Pemerintah selaku Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) pada instansi yang berwenang.

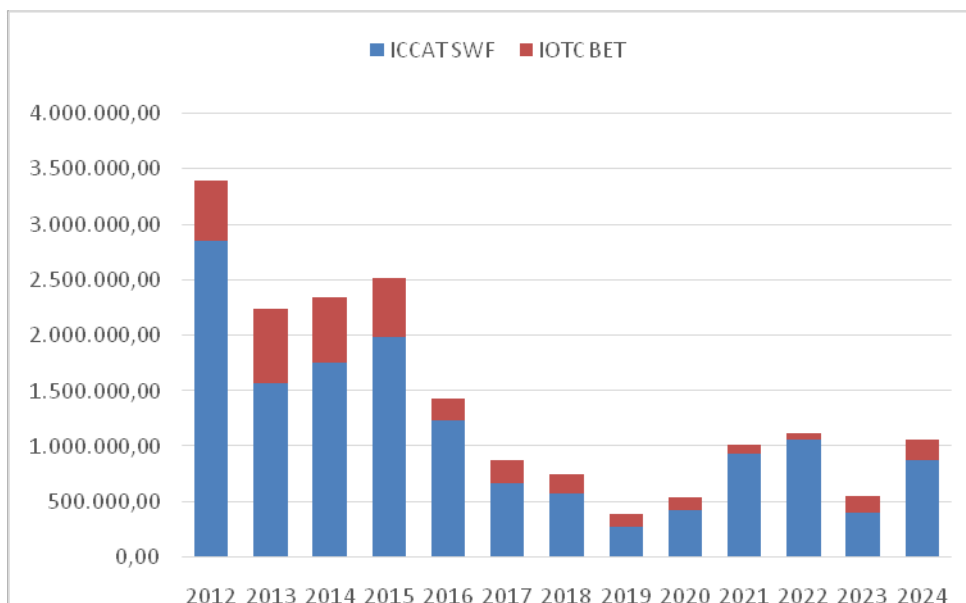
Dalam rangka pelaksanaan ekspor ikan jenis swordfish (ikan pedang) sesuai dengan resolusi *International Commission for The Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT) “*Recommendation by ICCAT establishing a Swordfish Statistical Document Program (Entered into force : September 21, 2002)*” menegaskan bahwa seluruh ekspor ikan jenis *Swordfish* ke Negara anggota ICCAT wajib dilengkapi dengan *ICCAT Swordfish Statistical Document*, mengacu pada paragraf 5 (lima) dan 6 (enam) *Recommendation by ICCAT Establishing a Swordfish Statistical Document Program*. Negara anggota tetap ICCAT maupun anggota tidak tetap ICCAT (termasuk Indonesia) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *ICCAT Swordfish Statistical Document*.

Tabel 23. Data Penerbitan IOTC dan ICCAT *Statistical Document* di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa

Tahun	IOTC BET		ICCAT SWF	
	Jumlah	Berat (Kg)	Jumlah	Berat (kg)
2010	251	277.039.00	0	0
2011	967	621.579.00	0	0
2012	916	540.325.00	772	2.848.610.96
2013	624	668.685.00	804	1.562.527.51
2014	800	586.945.35	792	1.749.509.63
2015	488	529.787.00	429	1.985.924.00
2016	104	200.673.08	378	1.230.323.00
2017	115	211.042.51	276	669.872.00
2018	137	171.684.74	232	581.768.81
2019	82	117.311	152	279.778.12
2020	65	122.661	288	423.695.70
2021	56	78.489.67	457	938.198.13
2022	74	63.330.58	363	1.056.946.85
2023	152	146.188.52	330	408.807.67
2024	202	187.193.85	671	878.785.60

Ikan *bigeye tuna* dan *swordfish* (meku) merupakan ikan pelagis besar yang olahannya cukup digemari. Dua jenis ikan ini cukup dinikmati sebagai ikan fresh di Jepang. Berdasarkan Tabel 22 terlihat bahwa pada tahun 2012 – 2024 ekspor ikan *bigeye tuna* mengalami penurunan dengan jumlah ekspor terendah terjadi pada tahun 2021 yang diakibatkan oleh adanya dampak pandemi Covid 19. Beberapa negara tujuan ekspor menutup sementara (*lockdown*) kegiatan ekspornya. Dan semenjak tahun 2022 mulai terjadi kenaikan jumlah ekspor Bigeye Tuna. terlihat dengan bertambahnya permintaan ikan Bigeye Tuna dan jumlah yang diekspor pun meningkat sebanyak 57%. Sedangkan, jumlah ekspor *swordfish* (meku) pada tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 150%.

Grafik 7. Data Ekspor *Bigeye Tuna* dan *Swordfish* di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa



Berdasarkan data yang tercatat di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa diketahui bahwa ekspor *Bigeye Tuna* dan *Swordfish* berupa ikan *fresh* dengan tujuan Negara Jepang. sedangkan dalam bentuk *frozen* dengan tujuan negara Jepang. China. France. USA. Canada. Italy. Portugal. Hongkong. Philippines. Singapore. Greece. United States. Trinidad and Tobago.

3.1.5. Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pelabuhan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan. Pedoman ini menjadi acuan dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur. Capaian penilaian evaluasi kinerja PPN Pengambengan dalam kurun waktu tahun 2024 mendapatkan nilai rata-rata sangat baik. Rincian perolehan nilai evaluasi kinerja PPN Pengambengan tahun 2024 semester I dan semester II sebagaimana tabel 24 dan tabel 25.

Tabel 24. Capaian evaluasi kinerja PPN Pengembangan semester I

No .	Jenis Kriteria	Bulan Penilaian					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	5	5	5	5	5	5
2	E-Logbook	0.5	2	2	2	0.5	2
3	Aplikasi SPB-online	0.5	2	2	0.5	0.5	2
4	SHTI	2	2	2	2	2	2
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	4	4	4	4	4	4
6	Pendapatan Pelabuhan	4	4	4	4	4	4
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	4	4	4	4	4	4
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	4	4	4	4	4	4
9	Panjang Dermaga	4	4	4	4	4	4
10	Kedalaman Kolam	4	4	4	4	4	4
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	2	2	2	2	2	2
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	2	2	2	2	2	2
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	4	4	4	4	4	4
14	Pelayanan Tambat Labuh	5	5	5	5	5	5
15	Produksi Perikanan	5	5	5	5	5	5
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	5	5	5	5	5	5
17	STBLKK	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	4	4	4	4	4	4
19	Fasilitasi Penyuluhan. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan. Perkarantinaan Ikan. Publikasi	4	3	4	4	4	4
20	Pelaksanaan K5	4	4	4	4	4	4
21	Penyaluran Air Bersih (kapal	4	4	4	4	4	4

	dan industri pengolahan)						
22	Penyaluran Es (kapal)	4	4	4	4	4	4
23	Penyaluran BBM (kapal)	5	5	5	5	5	5
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	4	4	4	4	4	4
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	3	3	3	3	3	3
26	Penyerapan Tenaga Kerja	3	3	3	3	3	3
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	4	4	4	4	4	4
Jumlah		95.25	97.25	98.25	96.75	95.25	98.25
Kesimpulan dan Rekomendasi		Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

Tabel 25. Capaian evaluasi kinerja PPN Pengembangan semester II

No	Jenis Kriteria	Bulan Penilaian					
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	5	5	5	5	5	4
2	E-Logbook	2	2	2	2	2	2
3	Aplikasi SPB-online	2	2	2	2	2	2
4	SHTI	2	2	2	2	2	2
5	Realisasi Penyerapan Anggaran	4	4	4	4	4	4
6	Pendapatan Pelabuhan	4	4	4	4	4	4
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	4	4	4	4	4	4
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	4	4	4	4	4	4
9	Panjang Dermaga	4	4	4	4	4	4
10	Kedalaman Kolam	4	4	4	4	4	4
11	Sarana Perbaikan (Docking, bengkel)	2	2	2	2	2	2
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	2	2	2	2	2	2
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	4	4	4	4	4	4

14	Pelayanan Tambat Labuh	5	5	5	5	5	5
15	Produksi Perikanan	5	5	5	5	5	5
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	5	5	5	5	5	5
17	STBLKK	1.25	1.25	1.25	3.75	2.5	3.75
18	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	4	4	4	4	4	4
19	Fasilitasi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan. Perkarantinaan Ikan. Publikasi	4	4	4	4	4	4
20	Pelaksanaan K5	4	4	4	4	4	4
21	Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	4	4	4	4	4	4
22	Penyaluran Es (kapal)	4	4	4	4	4	4
23	Penyaluran BBM (kapal)	5	5	5	5	5	5
24	Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP	4	4	4	4	4	4
25	Pemanfaatan Lahan Pelabuhan	3	3	3	3	3	3
26	Penyerapan Tenaga Kerja	3	3	3	3	3	3
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	4	4	4	4	4	4
Jumlah		98.25	98.25	98.25	100	99.05	99.
Kesimpulan dan Rekomendasi		Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

3.1.6. PNBP Pasca Produksi

Pelaksanaan PNBP pasca produksi dari sumber daya alam di Pelabuhan Umum Benoa dilaksanakan mulai bulan maret 2023. Pada tahun 2024 total penerimaan kegiatan PNBP Pasca Produksi mencapai Rp.85.122.848.431.- Total penerimaan PNBP Pasca Produksi di PU. Benoa mengalami peningkatan sebesar 73.07% dari tahun 2023. Data penerimaan PNBP pasca produksi di PU. Benoa tahun 2024 sebagaimana tabel 26.

Tabel 26. Capaian PNBP Pasca Produksi di PU Benoa

No	Bulan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Kg)	PNBP (Rp)	Produksi (Kg)	PNBP (Rp)
1	JANUARI	3.212.111	-	2.908.628	8.004.501.612
2	FEBRUARI	3.864.698	-	4.135.463	6.010.824.260
3	MARET	2.537.557	69.585.460	3.519.513	5.659.346.362
4	APRIL	3.394.089	111.252.040	3.434.501	5.678.039.161
5	MEI	2.476.278	423.518.870	3.151.484	4.384.520.381
6	JUNI	3.105.412	751.047.546	3.057.109	4.187.745.043
7	JULI	2.731.203	2.433.990.019	3.730.838	4.055.658.701
8	AGUSTUS	2.671.007	3.475.176.624	3.555.576	5.183.131.297
9	SEPTEMBER	4.403.548	4.883.735.536	3.221.224	4.076.425.514
10	OKTOBER	5.057.157	13.616.726.218	4.751.936	7.918.529.141
11	NOVEMBER	5.665.633	13.295.152.864	4.156.222	5.685.721.423
12	DESEMBER	8.150.253	10.124.282.388	5.562.443	24.278.405.536
TOTAL		47.268.945	49.184.467.565	45.184.938	85.122.848.431

3.1.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Operasional Pelabuhan

1. Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan, berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang tercantum dalam subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan point (8) menyatakan bahwa Sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB). Sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah dokumen yang

diberikan oleh kepala pelabuhan perikanan kepada setiap awak kapal perikanan yang telah mengikuti bimbingan teknis terkait cara penanganan ikan yang baik. prinsip Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). anitasi dan hygiene.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2024 PPN Pengembangan melaksanakan Bimbingan Teknis CPIB sebanyak 4 kegiatan. berikut tanggal dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis CPIB yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 27.

Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek CPIB

No.	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta
1	21 Agustus 2024	PPN Pengembangan	30
2	6 Juni 2024	PU. Benoa	30
3	22 April 2024	PU. Benoa	30
4	24 April 2024	PP. Tenau	60

Narasumber dari kegiatan ini merupakan pegawai PPN Pengembangan di bidang Operasional Pelabuhan yaitu Bapak Bagus Sudananjaya. S.St.Pi.. M.Pi.. Ibu Luh Putu Ari Widiani. S.Pi.. Elwidya Bastian. S.Pi.. Aisyah Nurulita Erka. S.Pi.. Andi Setyo Nugroho. S.Pi.. Hitler Sumah. Putu Gede Hartaryawan. dan I Kadek Sunarta. Pemberian materi dilakukan secara bergiliran. Materi yang disampaikan yaitu tentang Prinsip ABCD. Teknik Penanganan Ikan di Atas Kapal. Proses Kemunduran Mutu. Persyaratan Hygine Personal. Teknik Penyimpanan Ikan Di Atas Kapal. dan Penerapan HACCP di Atas Kapal Perikanan.

2. Rapat Koordinasi

3. Data Produksi di Pelabuhan Perikanan

Data produksi perikanan tangkap merupakan semua hasil penangkapan ikan yang ditangkap dari laut baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan. yang nantinya hasil dari data produksi tersebut dituangkan dalam Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Data dan informasi pelabuhan perikanan digunakan untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan, meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan mendukung perumusan kebijakan di bidang pelabuhan perikanan. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas data produksi hasil tangkapan dalam rangka pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan.

Pelaksanaan kegiatan Rakor Data Produksi di Pelabuhan Perikanan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan, yaitu pada tanggal 26 Juni 2024, dengan jumlah peserta yaitu 20 peserta yang terdiri dari Dianas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, Petugas TPI, perwakilan dari Tim Kerja Kesyahbandaran, Tim Kerja TKPU, Tim Kerja TU, dan Tim Kerja Operasional Pelabuhan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kreteg Nyirang, Kecamatan Negara.

Materi yang disampaikan yaitu terkait peran PIPP di pelabuhan perikanan, mekanisme pendataan di pelabuhan perikanan, dan sinkronisasi data produksi perikanan tangkap bulan Januari s.d. Mei tahun 2024. Selama kegiatan berlangsung, berkembang diskusi terkait kendala yang ada selama proses pendataan produksi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan data produksi yang ada di pelabuhan dengan data produksi yang ada di TPI dapat sinkron dan data produksi yang disajikan nantinya lebih valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Evaluasi Kinerja Operasional di Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, pada pasal 36 disebutkan bahwa setiap Pelabuhan Perikanan harus memiliki Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). PIPP merupakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan perikanan. Dalam aplikasi PIPP tersebut terdapat penilaian evaluasi kinerja (evkin) pelabuhan perikanan setiap bulannya dan dari hasil penilaian evkin dapat diketahui realisasi yang sudah tercapai dari target yang telah ditentukan.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan informasi terkait hasil data produksi selama triwulan I berjalan, serta pemaparan hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan perikanan dan mendiskusikan hambatan atau kendala serta mencari solusi

dalam kegiatan menghimpun data-data pada tim kerja lain untuk diinput dalam penilaian evaluasi kinerja di PIPP.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 dan dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari Kepala Pelabuhan. Tim kerja Operasional. Tim kerja Kesyahbandaran. Tim Kerja TKPU. Tim kerja Dukungan Manajerial. perwakilan petugas PSDKP. dan perwakilan outsourcing dari PT. Ayuma Usaha Sejahtera.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Kesyahbandaran

Sesuai Undang-undang Nomor 27 tahun 2021 tentang bidang perikanan. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan

3.2.1. Pelayanan SPB

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. bagi kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. kelaiktangkapan. dan kelaiksimpanan. Kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang berukuran < 5 GT tidak wajib di terbitkan SPB nya. sedangkan yang berukuran > 5 GT s/d 30 GT wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal perikanan yang akan bertolak dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

Jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2022 sejumlah 108 dokumen. tahun 2023 sejumlah 115 dokumen. dan tahun 2024 sejumlah 990 dokumen. Pada awal bulan November tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 36 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor No 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kapal pukat cincin pelagis kecil yang sebelumnya tidak terakomodir pada permen 18 Tahun

2021 dapat terakomodir pada Permen No 36 Tahun 2023 sehingga kapal pukat cincin pelagis kecil yang ada di PPN Pengambengan dapat beroperasi di WPP 573. Saat ini proses perizinan dari kapal-kapal di PPN Pengambengan masih berjalan untuk bisa dikeluarkan SIPI sehingga nantinya penerbitan SPB bisa dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 28.

Tabel 28. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2022 – 2024

No	Bulan	Penerbitan SPB			Keterangan
		2022	2023	2024	
1	Januari	20	11	0	Kapal PCPK dengan dua kapal
2	Februari	20	0	14	Kapal PCPK dengan dua kapal
3	Maret	28	4	14	Kapal PCPK dengan dua kapal
4	April	20	12	0	Kapal PCPK dengan dua kapal
5	Mei	0	6	0	Kapal PCPK dengan dua kapal
6	Juni	0	18	18	Kapal PCPK dengan dua kapal
7	Juli	2	6	12	Kapal PCPK dengan dua kapal
8	Agustus	6	6	36	Kapal PCPK dengan dua kapal
9	September	3	26	70	Kapal PCPK dengan dua kapal
10	Oktober	1	26	228	Kapal PCPK dengan dua kapal
11	November	4	0	332	Kapal PCPK dengan dua kapal
12	Desember	4	0	266	Kapal PCPK dengan dua kapal
Jumlah		108	115	990	

Sejak bulan juni tahun 2024 seiring dengan pelaksanaan program PNBP pasca produksi PPN Pengambengan mulai melayani Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal-kapal perikanan di PU. Benoa. Data penerbitan Surat Persetujuan Berlayar selama tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 29.

Tabel 29. Data penerbitan SPB di PU. Benoa

No	Bulan	Penerbitan SPB
1	Januari	80
2	Februari	68
3	Maret	92
4	April	98
5	Mei	249
6	Juni	310
7	Juli	304

8	Agustus	249
9	September	234
10	Oktober	184
11	November	115
12	Desember	50
Jumlah		2033

3.2.2. Pelayanan Log Book Penangkapan Ikan

1. Pelayanan Penerimaan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan

Logbook penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan. Setiap kapal perikanan yang memiliki SIPI wajib mengisi logbook penangkapan ikan. Pengisian logbook penangkapan ikan dilakukan pada setiap operasi penangkapan ikan. Logbook penangkapan ikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar internasional yang diterima secara umum yang disusun berdasarkan jenis alat penangkapan ikan.

Logbook penangkapan ikan terdiri atas:

- Logbook rawai tuna dan pancing ulur (*long line and hand line*);
- Logbook pukot cincin, huhate, dan pancing tonda (*purse seine, pole and line, and trolling line*); dan
- Logbook alat penangkapan ikan lainnya.

Beberapa tujuan penting dari penerapan logbook antara lain :

- Logbook penangkapan ikan sebagai *landing declaration* dari nakhoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan;
- Logbook penangkapan ikan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume);
- Logbook penangkapan ikan mencatat data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal, pelabuhan pangkalan kapal tersebut dan 4) Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (*fishing capacity, efficiency fishing*, musim penangkapan kaitannya dengan *open and close session*, dan konservasi).

Pelayanan log book penangkapan ikan di PPN Pengambengan masih terkendala pengurusan dokumen izin kapal yang belum tuntas sehingga pelayanan belum maksimal. Data Logbook penangkapan ikan yang diverifikasi di PPN Pengambengan selama tahun dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30. Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pengambengan Tahun 2024

No	Bulan	Logbook		
		2022	2023	2024
1	Januari	28	5	0
2	Februari	21	0	4
3	Maret	14	0	5
4	April	38	3	0
5	Mei	18	3	0
6	Juni	9	13	0
7	Juli	23	4	0
8	Agustus	20	2	7
9	September	12	10	3
10	Oktober	14	12	26
11	November	20	1	22
12	Desember	17	0	16
Jumlah		234	53	83

Jumlah Logbook penangkapan ikan yang telah diperiksa/diverifikasi oleh petugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan pada tahun 2022 berjumlah 234 Logbook. dan pada tahun 2023 berjumlah 53 logbook. dan tahun 2024 sebesar 83 logbook. mengalami peningkatan sebesar 56.6 %.

Tabel 31. Jumlah Logbook yang Diterima di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa.

Bulan	Dokumen yang Diterima									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	142	103	73	59	85	98	96	95	81	125
Februari	103	72	53	46	33	60	114	65	70	52
Maret	116	116	64	72	57	77	116	117	100	117

April	162	130	93	92	55	105	127	131	42	49
Mei	93	136	100	69	36	57	63	53	35	97
Juni	108	154	108	60	36	65	58	62	17	88
Juli	107	69	55	66	24	61	60	55	52	124
Agustus	94	77	49	39	29	52	61	53	58	47
September	106	93	64	49	50	52	47	35	62	52
Oktober	109	101	72	63	62	53	52	50	46	41
November	79	51	80	49	63	52	54	35	43	37
Desember	130	79	54	63	119	99	69	52	175	42
Total	1.349	1.181	865	727	649	831	917	803	781	871

Tabel 32. Jumlah Produksi Tangkapan Ikan Berdasarkan Logbook Penangkapan Ikan.

Bulan	Jumlah Hasil Tangkapan yang Didaratkan (Ton)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1.334	2.049	1.048	1.363	1.849	1.980	3.234	2.876	2.964	3.775
Februari	1.164	1.063	782	1.035	799	1.389	3.318	1.545	3.234	1.409
Maret	1.608	1.791	1.271	1.506	1.648	1.472	4.228	3.335	2.698	1.527
April	2.899	3.872	1.991	2.075	1.681	2.572	4.643	3.472	1.087	1.300
Mei	1.412	2.881	2.137	1.661	1.160	955	1.526	1.697	1.296	1.495
Juni	1.242	2.538	1.886	1.291	684	1.759	2.032	2.141	573	1316
Juli	1.522	944	1.162	1.451	669	1.569	2.041	2.446	506	1821
Agustus	1.087	1.388	1.167	930	1.623	1.923	2.597	2.053	1.158	666
September	1.212	1.656	2.103	1.551	1.785	1.319	2.137	1.348	1.924	749
Oktober	1.269	2.379	1.343	1.295	1.638	1.318	1.804	2.530	1.666	885
November	1.191	829	1.347	1.355	1.426	2.389	2.033	1.381	1.320	776
Desember	2.560	1.559	1.218	2.423	2.522	2.516	2.441	2.213	3.551	1.174
Total	18.500	22.949	17.455	17.936	17.484	21.160	32.034	27.037	21.976	16.895

2. Pelayanan Aktivasi dan Verifikasi E-Logbook Penangkapan Ikan

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pendataan aktifitas penangkapan ikan dan hasil tangkapan di atas kapal perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memanfaatkan kemajuan teknologi berbasis *android* dengan menerapkan *e-logbook* penangkapan ikan melalui aplikasi *mobile* untuk nahkoda kapal dan aplikasi *website* bagi admin dalam melakukan aktivasi dan verifikasi.

Alasan adanya *e-logbook* ini adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan kertas (*less paper*);

2. Penyampaian data log book yang tidak langsung pada saat operasi penangkapan. dikarenakan masih menggunakan kertas;
3. Kepatuhan nelayan/pelaku usaha yang masih rendah;
4. Data yang disampaikan belum tersaji secara akurat dan objektif;
5. Format laporan log book untuk nelayan kecil yang tidak sederhana;
6. Belum adanya mekanisme verifikasi dan validasi data log bok yang mudah dan cepat.

Aplikasi ini cukup mudah untuk diisi oleh nahkoda kapal. karena beberapa data seperti data identitas kapal dan jenis hasil tangkapan telah tersedia di dalam aplikasi. sedangkan data waktu dan koordinat daerah penangkapan telah otomatis terdata oleh aplikasi melalui *Global Positioning System* (GPS) yang tersedia di dalam aplikasi saat pendataan dilakukan. Kelebihan aplikasi ini adalah dapat melakukan pendataan dalam *mode offline*. jaringan online hanya dibutuhkan pada saat login pertama kali saat keberangkatan dari pelabuhan dan pengiriman data setelah kapal sampai kembali di pelabuhan

Aplikasi ini mulai dilakukan *launching* pada bulan Oktober 2018 dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Syahbandar / petugas logbook kepada para nahkoda / pengurus kapal. Pada tahun 2023 petugas logbook di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa telah melakukan aktivasi terhadap 27 kapal penangkap ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Umum Benoa. dan pada tahun 2024 tidak ada aktivasi logbook kapal penangkap ikan.

Tabel 33. Aktivasi-Verifikasi E-logbook Penangkapan Ikan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa Tahun 2024

Bulan	Aktivasi	Pelaporan	Produksi
	(Unit)	(Lembar)	(Ton)
Januari	0	125	3.775
Februari	0	52	1.409
Maret	0	117	1.527
April	0	49	1.300
Mei	0	97	1.495
Juni	0	88	1.316
Juli	0	124	1.821
Agustus	0	47	666
September	0	52	749

Oktober	0	41	885
November	0	37	776
Desember	0	42	1.174
Total	0	871	16.893

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/PER-DJPT/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan, yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30 GT melaporkan log book penangkapan ikan melalui aplikasi e-log book yang dapat diunduh melalui *playstore* pada masing-masing perangkat sesuai dengan alur proses. Pelaksanaan e-logbook penangkapan ikan sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2019.

Terdapat 871 lembar logbook yang dilaporkan oleh kapal perikanan pada tahun 2024 dengan total produksi 16.893 ton. Penggunaan e-logbook ini merupakan salah satu inovasi yang dapat mempermudah verifikasi logbook hasil tangkapan ikan dan data yang diperoleh adalah data real time dari nahkoda kapal itu sendiri.

3.2.3. Penerbitan STL BKK

Selain penerbitan SPB kegiatan kesyahbandaran juga menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan yang merupakan kegiatan kapal pada saat melakukan aktifitas tambat, labuh dan bongkar di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Berikut data penerbitan Tanda Bukti Lapor (STBL) Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan pada tabel 34 dibawah ini.

Tabel 34. Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) Kapal Perikanan di PPN Pengambangan

No	Bulan	Kedatangan			Keberangkatan		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Januari	453	261	845	475	279	869
2	Februari	670	117	735	710	118	717
3	Maret	899	101	736	903	97	727
4	April	1211	48	395	1075	45	418
5	Mei	792	202	469	838	194	464
6	Juni	580	456	556	554	456	555
7	Juli	323	244	528	345	240	537
8	Agustus	1079	389	553	1082	429	546

9	September	925	705	561	924	699	558
10	Oktober	797	802	386	785	799	384
11	November	712	932	500	493	922	498
12	Desember	516	846	345	492	866	349
Jumlah		10.762	8.957	6.609	10.751	8.676	6.622

Pada tahun 2024 penerbitan STBLK Kedatangan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sekitar 26.2% dan STBLK keberangkatan juga mengalami penurunan dari tahun 2023 sekitar 23.67% dimana jumlah kapal tersebut diatas merupakan kapal yang melakukan aktifitas tambat, labuh dan bongkar di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

3.2.4. Pelayanan Penerbitan SHTI

Dalam rangka memastikan efektifitas perdagangan ekspor produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa (UE) dengan mendasarkan pada telah diterbitkannya *EC Regulation 1005/2008 to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, maka Indonesia mengembangkan suatu kebijakan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.13/MEN/2013, pengertian Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Lokal yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan berasal dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

SHTI diterapkan terhadap semua perdagangan produk hasil tangkapan ikan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, berasal dari kapal penangkap ikan negara berbendera dan diekspor melalui/tidak melalui negara ketiga ke negara-negara Uni Eropa.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) dan divalidasi oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten. dalam hal ini PPN Pengambengan ditunjuk sebagai salah satu unit kerja yang dapat memvalidasi penerbitan SHTI. PPN Pengambengan sudah mulai melakukan penerbitan SHTI sejak bulan Februari 2010 untuk ikan hasil tangkapan laut yang ditangkap mulai

tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan penerbitan SHTI ini dilakukan oleh Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa (yang merupakan perpanjangan tangan dari PPN pengambengan) terhadap hasil tangkapan ikan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Umum Benoa.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan terdiri atas tiga jenis lembar yaitu Lembar Turunan (*Derivative Sheet*). Lembar Turunan yang Disederhanakan (*Simplified Derivative Sheet*) serta SHTI impor.

Lembar Turunan adalah lembar yang memuat sebagian atau seluruh hasil tangkapan sesuai lembar awal dan berfungsi sebagai kelengkapan perdagangan untuk ekspor ke Uni Eropa. sedangkan Lembar Turunan Disederhanakan penyederhanaan bagi Lembar Awal dan Lembar Turunan SHTI yang diperuntukan untuk ekspor hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal perikanan ukuran < 20 GT.

SHTI Import adalah sertifikat yang dikeluarkan apabila bahan bakunya berasal dari impor untuk kemudian diolah didalam negeri dan diekspor kembali. Hingga saat ini Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan belum pernah menerbitkan Lembar SHTI Impor. Adapun data penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa dapat dilihat pada tabel 35.

Pada Tabel 35 dapat kita lihat jumlah penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa mulai tahun 2010 hingga 2024. Sampai dengan akhir Desember tahun 2024. Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa telah menerbitkan sebanyak 3.494 lembar sertifikat SHTI. yang terdiri dari 2.574 lembar LA. 754 lembar SHTI LT dan 166 lembar SHTI LTS.

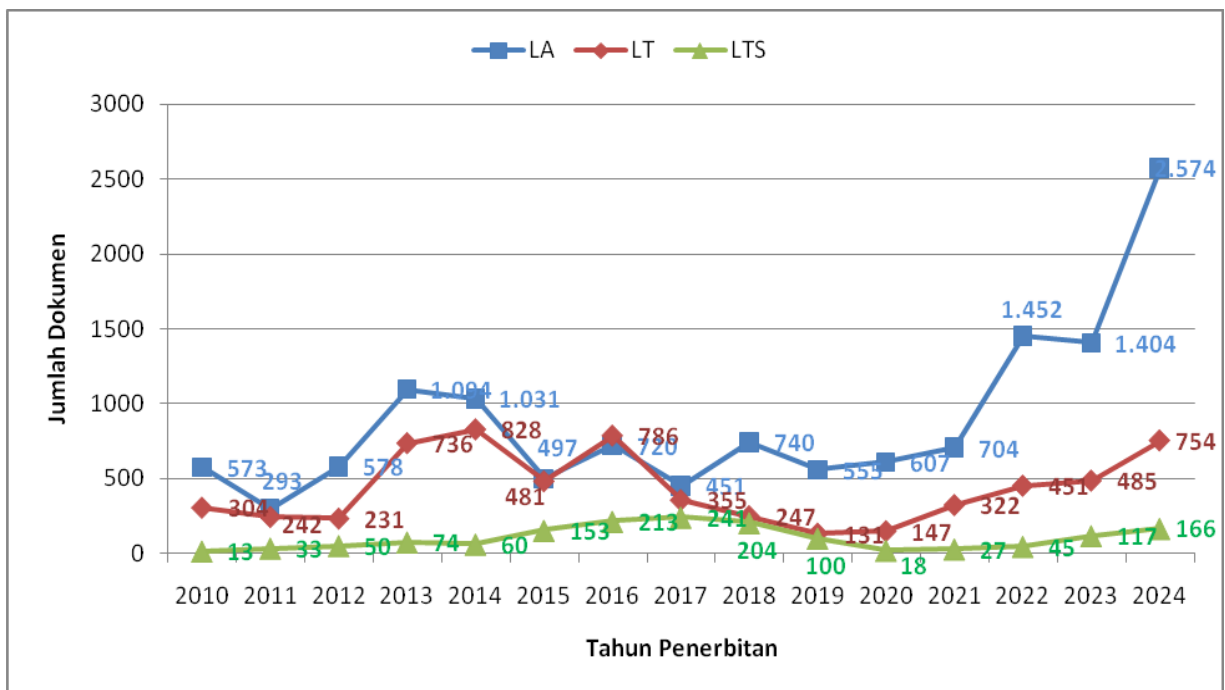
Penerbitan SHTI hingga saat ini masih tergantung dari permohonan penerbitan oleh pihak pemohon (pemilik kapal/nahkoda/Unit Pengolahan Ikan/Eksportir Ikan). Oleh sebab itu walaupun data dalam Lembar Awal dianggap sebagai control data hasil tangkapan ikan. namun hasilnya dianggap belum cukup maksimal. karena masih banyak kapal-kapal perikanan yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Umum Benoa tidak mengajukan permohonan untuk menerbitkan SHTI Lembar Awal.

Tabel 35. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa

Tahun	Jumlah Penerbitan SHTI			Total
	LA	LT	LTS	
2010	573	304	13	890
2011	293	242	33	568
2012	578	231	50	859
2013	1.094	736	74	1.904
2014	1.031	828	60	1.919
2015	497	481	153	1.131
2016	720	786	213	1.719
2017	451	355	241	1.047
2018	740	247	204	1.191
2019	555	131	100	786
2020	607	147	18	772
2021	704	322	27	1.053
2022	1.452	451	45	1.948
2023	1.404	485	117	2.006
2024	2.574	754	166	3.494

Bila dilihat dari data pada Grafik 8 dapat kita lihat terjadinya fluktuasi penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Pada tiga tahun pertama SHTI mulai diterapkan, lembaran SHTI yang diterbitkan masih kurang dari 1.000 lembar per tahun. Hal ini dikarenakan masih banyak stakeholder yang belum mengetahui mengenai SHTI, sehingga petugas juga melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa di wilayah Pelabuhan Umum Benoa.

Grafik 8. Data Penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa



Penerbitan SHTI di PU Benoa mengalami fluktuasi. pada tahun 2015 terjadi penurunan penerbitan SHTI hingga 41% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu dampak dari moratorium usaha perikanan yang mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2014. Diberlakukannya Peraturan Menteri KP Nomor PER.56/MEN/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebabkan kapal-kapal eks asing tidak boleh melakukan perpanjangan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pelabuhan Umum Benoa merupakan salah satu pelabuhan dengan jumlah kapal eks asing terbanyak di Indonesia. Pada saat itu tercatat ada 142 kapal eks asing yang dilarang beroperasi karena dilarang melakukan perpanjangan SIPI/SIKPI. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah SHTI yang diterbitkan, terutama SHTI Lembar Awal. Dari data diketahui penurunan penerbitan SHTI LA mencapai 52%.

Penurunan ini juga disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri KP Nomor PER.57/MEN/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (penghentian

alih muat/*transshipment* di laut). Hal ini disebabkan karena sebagian besar kapal penangkap ikan di Pelabuhan Umum Benoa merupakan kapal long line yang beroperasi di Laut Lepas Samudera Hindia sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk operasional (operasi kapal penangkap bisa mencapai 11 bulan lebih). Sehingga untuk menjaga mutu hasil tangkapannya, kapal-kapal penangkap ini menitipkan hasil tangkapannya (*transshipment*) kepada kapal pengangkut di tengah laut. Kapal-kapal pengangkut inilah yang akan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalannya, sementara kapal penangkap ikannya tetap melakukan penangkapan hingga masa berlaku SIPI kapal habis. Menurut beberapa pemilik kapal, selain dapat menjaga mutu hasil tangkapan, proses alih muat/penitipan ikan ini juga dapat menghemat biaya operasional kapal-kapal perikanan mereka. Dan dengan dilarangnya alih muat ikan di tengah laut ini, menyebabkan sebagian besar kapal pengangkut dan kapal penangkap ikan tidak beroperasi dan berkurangnya permohonan penerbitan SHTI LA yang diajukan ke Pos Pelayanan UPT PPN Pengambengan.

Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa peningkatan jumlah penerbitan SHTI LTS ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini merupakan dampak positif yang bisa terlihat dari moratorium usaha perikanan tersebut. Dengan dilarangnya kapal-kapal eks asing yang notabene merupakan kapal berukuran besar dan mempunyai teknologi penangkapan yang modern, memberikan kesempatan kapal-kapal dalam negeri yang ukurannya kecil (< 20 GT) untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik, baik dari kuantitas maupun kualitas.

Pada tahun 2017 s.d 2024 terjadi fluktuasi jumlah penerbitan SHTI di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah SHTI yang diterbitkan, terutama pada penerbitan SHTI Lembar Turunan dan SHTI Lembar Turunan yang Disederhanakan (LTS). Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020. Pembatasan kegiatan dan beberapa negara menerapkan *lockdown* selama masa pandemi berpengaruh pada kegiatan ekspor produk ikan dari Pelabuhan Benoa. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah penerbitan SHTI LA, LT, dan LTS sebesar 7.01% dan LTS sebesar 74.17% dari tahun 2023.

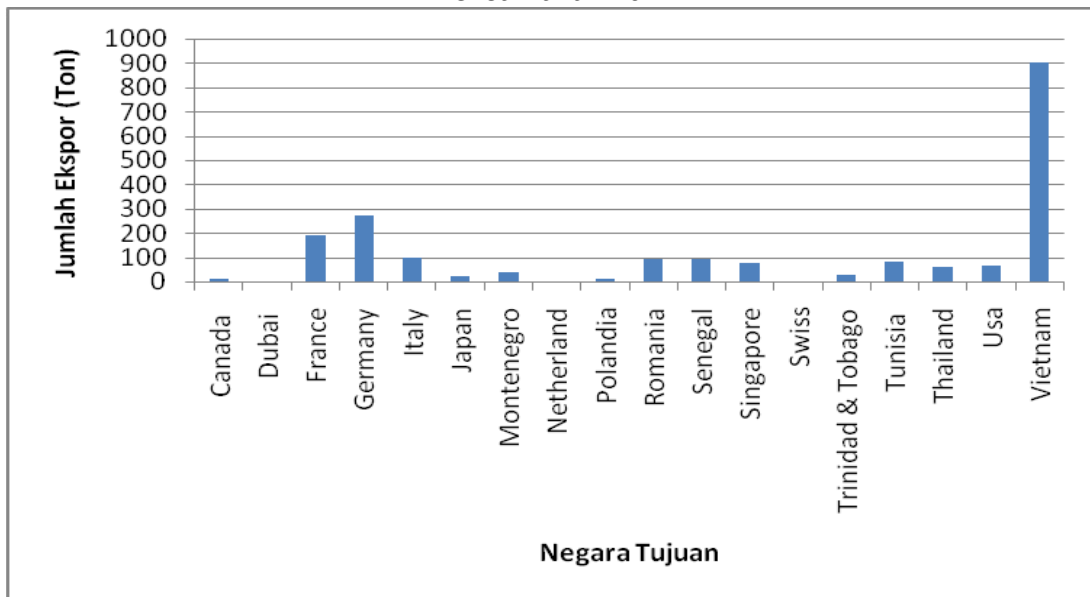
Tabel 36. Negara Tujuan Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI

Negara	Jumlah Ekspor Ikan Hasil Tangkapan Berdasarkan SHTI (Ton)									Total (Ton)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Belgium	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Bulgaria	-	-	-	-	-	25.7	-	19.62		45.32
Canada									10.15	10.15
China	777.7	180.7	52.0	0.1	50.5	-	-	-		1.061.00
Comoros	-	-	-	-	-	42.97	87.07	115.20		245.24
Croatia	-	-	-	-	-	14.2	-	-		14.20
Dubai									0.98	0.98
Equador	-	50.7	-	-	-	-	-	-		50.70
France	173.8	279.5	301.6	160.9	127.8	105.3 4	110.44	132.00	192.68	1.584.06
Germany	203.9	118.4	79.4	38.4	5.1	51.6	41.39	393.25	274.51	1.205.95
Greece	-	-	10.2	-	-	-	-			10.20
Hongkong	-	-	-	-	-	-	-			-
Italy	70.7	53.0	87.2	83.3	102.0	254.8 6	158.63	89.18	96.05	995.02
Jamaica	-	-	-	-	-	14.04	16.48			30.52
Japan	-	-	-	-	-	-	15	105.00	23.25	143.25
Kongo	-	-	-	-	-	-	79.19			79.19
Lebanon	-	-	-	-	-	-	-			-
Libya	-	-	-	-	-	-	-	20.52		20.52
Mesir	-	-	-	-	-	-	-	8.34		8.34
Montenegro	-	-	-	-	-	22.6	76.93	114.41	36.59	250.53
Netherland	262	40.3	8	-	-	-	52.34	33.93	2.54	399.11
Philippine	-	-	-	-	-	-	-	50.00		50.00
Portugal	100.7	36.2	49.2	-	24.6	42.6	96.99	24.05		374.34
Polandia									8.60	8.60
Romania	-	-	-	-	-	-	37.04	29.93	94.13	161.10
Russia	-	-	-	-	-	-	-			-
Senegal	-	-	-	-	-	166.7 6	100.92	50.27	92.81	410.76
Serbia	-	-	-	-	-	-	-	42.56		42.56
Singapore	-	5.9	76.8	49.6	-	101.7	176.32	48.91	76.85	536.08
Spains	49.2	26	75.3	-	-	67.8	-			218.30

Srilanka	-	-	-	-	-	-				-
Swiss	-	-	0.5	-	-	2.71	2.47	2.47	0.44	8.59
Sweden	-	-	-	-	-	-	29.16	29.16		58.32
Taiwan	-	-	-	-	-	-	-			-
Trinidad & Tobago									27.22	27.22
Tunisia									81.00	81.00
Thailand	157.2	75.2	-	-	50.0	25.2	103.24	96.92	59.86	567.62
Turkey	-	-	-	-	-	-	-			-
Uk	28.3	38.6	-	-	-	49.5	-	36.38		152.78
Ukraine	-	-	-	-	-	-	-			-
Usa	-	-	-	9.1	18.4	46.5	265.4	205.95	63.07	608.42
Vietnam	-	-	-	-	54.7	653.0 7	226.36	53.84	903.48	1.891.45
TOTAL										11.351.32

Berdasarkan Tabel 36 kita dapat melihat data negara-negara tujuan ekspor yang tercatat pada SHTI LT dan LTS yang diterbitkan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa. Dari data tersebut terhitung jumlah ikan hasil tangkapan yang telah diekspor dari tahun 2015 sd 2024 berjumlah 11.351.32 ton dengan tujuan 34 negara di wilayah Uni Eropa, Amerika, Afrika dan Asia. Pada tahun 2024 negara tujuan ekspor antara lain Kanada, Dubai, France, Germany, Italy, Japan, Montenegro, Netherland, Polandia, Romania, Senegal, Singapore, Swiss, Trinidad & Tobago, Tunisia, Thailand, USA, dan Vietnam, sebagaimana grafik 9.

Grafik 9. Negara-negara Tujuan Ekspor Utama Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Benoa Tahun 2024



Negara-negara Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor berdasarkan SHTI LT dan LTS yang diterbitkan OKL PPN Pengambengan antara lain Italy. Montenegro. France. Romania. Portugal. Netherland. Germany. dan Swiss. Adapun hasil perikanan yang diekspor ke Negara-negara tersebut beraneka ragam, seperti yellowfin tuna, albacore, bigeye tuna, gurita dan sarden yang diolah menjadi berbagai produk baik dalam bentuk beku ataupun ikan kaleng. Selain Negara-negara UE dan Negara tetangga (Vietnam, Singapura dan Thailand), produk hasil perikanan dari PU, Benoa juga diekspor ke New York (Amerika), Jamaica di Kepulauan Karibia, bahkan sampai ke Senegal yang ada di Africa Barat dan Negara Komoro yang terletak di Africa bagian Timur.

Adapun produk hasil perikanan yang dikirim ke Amerika dan Jamaica terdiri atas Yellowfin dan Bigeye Tuna, sedangkan produk yang dikirim ke Senegal berupa ikan Baracuda, Gulama, Kuro dan Cobia beku. Untuk Negara Komoro dikirim ikan sarden yang dikalengkan dan dikirim dalam bentuk beku.

3.2.5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpangkalan dan Pendaratan Ikan dan Surat Kepatuhan Kapal (Pendaftaran kapal di RFMO)

Setiap orang per orang dan badan hukum yang akan melakukan usaha/kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus mempunyai Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). Dalam SIUP ini tercantum nama pemilik kapal/badan hukum pemilik kapal. alamat pemilik. nomor NPWP. Nomor telepon pemilik yang bisa dihubungi. nomor permohonan. foto pemilik. jumlah kapal yang dimiliki. jumlah gross tonnage kapal. lokasi penangkapan dan jenis kapal perikanan yang dimiliki.

Ada 2 (dua) jenis kapal komersial perikanan yang diizinkan beroperasi di Indonesia. yaitu kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan operasional *port-to-port*. Setiap kapal perikanan ini wajib memiliki surat izin penangkapan/pengangkutan ikan selama operasional. Proses permohonan penerbitan. perpanjangan dan/atau perubahan izin usaha dan izin operasional kapal perikanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang "Usaha Perikanan Tangkap" pada pasal 128 ayat 2 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Pendaratan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan menjadi acuan bagi Direktur Jenderal dan Gubernur dalam melakukan evaluasi laporan kegiatan usaha dari pelaku usaha perikanan tangkap. Laporan kegiatan usaha tersebut dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) diterbitkan. Sehingga dari penjelasan tersebut. surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan sudah tidak menjadi syarat dalam perpanjangan SIPI dan SIKPI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Nopember 2020. Semenjak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang "Usaha Perikanan Tangkap". pada tahun 2022 ini tidak ada penerbitan surat keterangan berpangkalan dan pendaratan ikan.

Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa juga menerbitkan Surat Kepatuhan Kapal untuk Pendaftaran RFMO (IOTC dan CCSBT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, setiap kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Laut Lepas wajib terdaftar di RFMO. Untuk kapal-kapal perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Benoa yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Samudera Hindia wajib mendaftarkan ikannya di IOTC dan bila kapal tersebut menangkap *Southern Bluefin Tuna* wajib terdaftar di CCSBT. Data mengenai penerbitan Surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan Kapal dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Data Penerbitan Surat Berpangkalan dan Pendaratan Ikan serta Surat Kepatuhan Kapal Untuk Pendaftaran RFMO

Tahun	Surat Berpangkalan dan Pendaratan	Surat Kepatuhan Kapal	
		IOTC	CCSBT
2015	225	287	285
2016	996	146	148
2017	1.033	216	214
2018	410	120	120
2019	452	130	130
2020	458	226	223
2021	0	182	183
2022	0	220	221
2023	0	0	0
2024	0	0	0

3.2.6. Operasional KM. Lumba-Lumba

Kegiatan kesyahbandaran juga mengkomodir kegiatan operasional KN. Lumba-lumba-18, dimana kapal syahbandar ini berlayar 1 (satu) kali dalam sebulan dengan jumlah personil 5 (lima) orang dalam rangka pemantauan lingkungan maritim dan pemantauan pencemaran limbah di WKOPP PPN Pengambengan.

Kegiatan kapal kesyahbandaran dalam mendukung tugas dan fungsi syahbandar yaitu:

1. Pemantauan aktifitas kapal kapal kolam pelabuhan serta lingkungan WKOPP PPN Pengambengan.
2. Pemantauan serta perlindungan lingkungan maritim serta pencemaran air laut di WKOPP PPN Pengambengan.
3. Melaksanakan pengukuran kedalaman secara berkala dikarenakan kolam pelabuhan PPN Pengambengan mengalami sedimentasi yang ekstrim.
4. Pengawasan kapal kapal dari luar pangkalan PPN Pengambengan yang akan melakukan aktifitas dikolam pelabuhan.

3.2.7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kesyahbandaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log book Penangkapan Ikan, pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan sertifikasi tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu bimbingan teknis (bimtek) atau pendidikan dan pelatihan (diklat).

Jalur bimtek dikhususkan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan, yaitu:

- (I) Basic Safety Training-Fisheries (BST-F) tingkat II;
- (II) Kecakapan nelayan;
- (III) Keterampilan penanganan ikan;
- (IV) Operasional penangkapan ikan;
- (V) Refrigasi penyimpanan ikan;
- (VI) Perawatan mesin kapal perikanan;
- (VII) Kecakapan nelayan bidang nautika; dan
- (VIII) Kecakapan nelayan bidang nautika teknika.

1. Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan

Untuk mewujudkan nelayan kecil dan awak kapal perikanan yang cakap dan terampil, dibutuhkan pula instruktur yang handal dan berkompeten. Instruktur akan melatih dan memberikan materi teknis kepada nelayan kecil dan awak kapal perikanan. Sebagai pelabuhan perikanan yang memiliki fungsi perusahaan

pelayanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan mengadakan sertifikasi awak kapal perikanan dengan tema Bimbingan Teknis SKN “Sertifikat Kecakapan Nelayan” untuk Nelayan ≤ 5 GT . Dalam Bimtek ini nelayan dengan kapal ≤ 5 GT dibekali ilmu terkait dengan kecakapan nelayan yang terdiri dari pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan. tindakan keselamatan dan potensi kecelakaan kerja di atas kapal perikanan. dan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan. berikut tabel penerbitan sertifikat SKN yang dilakukan oleh PPN Pengambengan seperti di bawah ini:

Tabel 38. Penerbitan sertifikat kecakapan nelayan

No	Kegiatan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	SKN Terbit
1	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Sikka. NTT	9 s/d 10 Februari	44
2	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Kupang. NTT	11 s/d 12 Februari	86
3	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Labuan Bajo. NTB	21 s/d 22 Februari	35
4	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Karangasem. Bali	22 s/d 23 Februari	51
5	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Sikka. NTT	26 s/d 27 Juli	50
6	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Candikusuma	22 Oktober	33
7	Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Melaya	3 s/d 4 Desember	15

2. Sosialisasi Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan. setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. laik tangkap. laik simpan dan laik pengawakan serta

kewajiban lainnya. Sebagai pelabuhan perikanan yang memiliki fungsi pengusaha pelayanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan mengadakan sosialisasi dengan tema Sosialisasi Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Dalam sosialisasi ini nelayan, pemilik kapal maupun pengurus kapal dibekali ilmu terkait dengan layanan kesyahbandaran, yang terdiri dari petunjuk teknis untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, laik simpan dan laik pengawakan serta kewajiban lainnya. Selain itu pemerintah daerah dan Pelabuhan Perikanan meningkatkan peran dalam upaya pelayanan kesyahbandaran serta menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelayanannya. Hal tersebut sangat berguna bagi nelayan, pemilik kapal, maupun pengurus kapal untuk mendapatkan layanan kesyahbandaran yang digunakan dalam berlayar, sehingga berdampak terhadap keselamatan operasional kapal perikanan.

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan menyelenggarakan “Operasional Syahbandar di Pelabuhan Perikanan” bertempat di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengambangan. Sosialisasi ini diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari instansi terkait, nelayan, pemilik kapal, dan pengurus kapal di PPN Pengambangan.

3. Workshop/Lokakarya On PSMA Global Information Exchange System Dan Adanya Kunjungan Lapangan Di Pelabuhan Benoa

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan merupakan salah satu Pelabuhan UPT Pusat yang terlibat dalam Pelaksanaan PSM sesuai dengan Keputusan Menteri KP Nomor: 52/KEPMEN-KP/2020 penetapan Designated Port dengan kriteria:

1. Penguatan data dan Informasi data Pelabuhan PPN Pengambangan
2. Ketersediaan sarana dan prasarana operasional dan pelayanan (termasuk eksternal)
3. Riwayat dan peluang kunjungan kapal asing
4. Perangkat jaringan internet/komunikasi
5. SDM

Pada hari Jumat, 13 Desember 2024 diadakan kegiatan Workshop/Lokakarya On PSMA Global Information Exchange System, bertempat di Aula KP3I (Kesatuan Pekerja Pelaut Perikanan Indonesia) di Bali. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Kepala Pelabuhan, instansi terkait pelaksanaan PSM, serta stakeholder yang terlibat dalam kegiatan PSMA di Pelabuhan Umum Benoa.

3.3. Pelaksanaan Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

3.3.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berpedoman pada PP Nomor 85 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengembangan pada tahun 2024 tercapai sebesar Rp. 1.166.849.139,- (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri dari PNBP Umum sebesar Rp. 23.779.600,- dan PNBP Fungsional sebesar Rp. 1.143.069.539,-. Jika dibandingkan dengan target PNBP Fungsional sebesar Rp. 760.971.000,-, maka capaian PNBP Fungsional sebesar 50.2%.

Pendapatan PNBP Umum ini berasal dari pendapatan dari pengelolaan BMN (pendapatan penjualan tanah, gedung, bangunan, dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin), penerimaan kembali belanja barang dan belanja modal tahun lalu. Sedangkan PNBP Fungsional diperoleh dari pendapatan Jasa berupa jasa tambat labuh, jasa pas masuk, jasa kebersihan, penggunaan tanah dan bangunan, listrik, air dan *cold storage*. Namun jika dibandingkan dengan perolehan PNBP Fungsional dimana pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 1.016.561.518,- maka pada tahun 2024 meningkat sebesar 12%, menjadi Rp. 1.143.069.539,-. Peningkatan PNBP ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan penerimaan tambat labuh dan sewa coldstorage, yang diatur sesuai dengan PP 75 tahun 2015 menjadi PP 85 tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perbandingan PNBP tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan pada tabel 39 berikut :

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2023 dan 2024.

No	Uraian	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
		2023	2024	2023	2024
A.	PNBP Umum	-		97.887.452	23.779.600
B.	PNBP Fungsional	526.050.000		1.016.561.518	1.143.069.539
1.	Jasa Kebersihan Pelabuhan	38.000.000	121.000.000	134.608.980	119.233.334
2.	Jasa Tambat labuh	64.950.000	270.500.000	390.140.841	299.982.502
3.	Jasa Pas Masuk	57.010.000	70.325.000	71.283.000	95.917.000
4.	Jasa pengadaan Air	15.000.000	15.000.000	13.780.559	22.537.594
5.	Jasa Penggunaan Listrik	24.210.000	14.526.000	7.455.958	14.403.761
6.	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	233.300.000	213.000.000	327.427.120	239.124.607
7.	Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin	93.580.000	56.620.000	71.865.060	351.870.741
Jumlah		526.050.00	760.971.000	1.114.448.970	1.166.849.139

Sedangkan jumlah Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) pada Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 40.

Tabel 40. Realisasi PNBP Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
A	PNBP Umum		23.779.600
B	PNBP Fungsional	<u>760.971.000</u>	1.143.069.539
	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan		
1	Kebersihan	121.000.000	<u>119.233.334</u>

	- Kios/Los/perkantoran	21.000.000	22.271.768
	- Tanah dan bangunan permanen	20.000.000	35.629.776
	- Kolam Pelabuhan	80.000.000	61.331.790
2	Pas Masuk	70.325.000	<u>95.917.000</u>
	- Kendaraan Roda 2	31.000.000	49.820.000
	- Kendaraan Roda 4	9.000.000	23.292.000
	- Kendaraan Roda 6	9.000.000	13.430.000
	- Kendaraan Roda 10	2.250.000	1.155.000
	- Bus	2.500.000	
	Pas masuk langganan	16.575.000	8.220.000
3	Tambat labuh	270.500.000	299.982.502
4	Air	15.000.000	22.537.594
5	Peralatan dan Mesin	56.620.000	351.870.741
	- Coldstorage	30.000.000	348.133.241.00
	- Es	6.620.000	
	- Keranjang	20.000.000	3.737.500
6	Pendapatan Jasa Lainnya		
	- Listrik	14.526.000	14.403.761
7	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana	200.000.000	239.124.607
	- Penggunaan tanah Pengembangan	100.000.000	56.364.941
	- Pemeliharaan Prasarana	100.000.000	164.381.880
8	Sewa Bangunan Permanen/Semi Permanen	9.000.000	8.240.500
9	Penumpukan barang	4.000.000	10.137.286
Jumlah		760.971.000	1.166.849.139

3.3.2. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PPN Pengambangan dalam rangka penyediaan fasilitas yang memadai untuk aktifitas perikanan yang efektif dan efisien dilakukan secara bertahap sejalan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan. Pada tahun 2024 telah dilakukan Rehab Bangunan Los Pasar PPN Pengambangan melalui DIPA PPN Pengambangan. Saat ini di PPN Pengambangan perlu dibangun tempat docking kapal/pemeliharaan kapal karena selama ini pemilik kapal menggunakan lokasi tambat labuh sebagai tempat perbaikan kapal sehingga dapat mengganggu aktivitas bongkar ikan dan mengganggu aktivitas tambat labuh kapal.

Selain itu fasilitas dermaga utama PPN Pengambangan perlu dilakukan perbaikan karena kondisinya sudah mengalami korosif dan perlu segera dilakukan grouting agar dermaga dapat berfungsi dengan baik. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin fasilitas yang ada di Pelabuhan. dengan mengedepankan fasilitas yang benar-benar rusak hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemeliharaan tahun 2024 di PPN Pengambangan.

Pendayagunaan Fasilitas dan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah dan bangunan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan membutuhkan investor yang dapat mendorong peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan investasi. Untuk menunjang hal tersebut PPN Pengambangan telah melakukan promosi melalui pameran terkait potensi yang ada di PPN Pengambangan sebagai stimulus untuk mendorong investasi di PPN Pengambangan.

Selain itu untuk peningkatan investasi, PPN Pengambangan juga melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sebagai fungsi pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang usaha yang sebesar-besarnya bagi investor baik pihak swasta, koperasi, KUB dan pelaku ekonomi lainnya. Daftar nama investor yang masuk di Kawasan PPN Pengambangan Tahun 2024 dapat dilihat di tabel 41.

Tabel 41. Investor yang sudah masuk PPN Pengambangan

No	Nama	Usaha	Luas Areal	Jumlah Pengguna
1.	PT. Dua Berjaya	SPBN 16 ton/hari	838 m ²	1
2.	Pemkab Jembrana	Cold Storage, Pabrik Es, Dock/Slipway	6.100 m ²	1
3.	PT. Cilacap Samudra Fishing Industry	Cold Storage, Pabrik Es, Pengalengan Ikan, Galangan Kapal	25.000 m ²	1
4.	H. Ali Nuri	Gudang Peralatan	780 m ²	1
5.	Koperasi Karyawan Harapan Terpadu	Penyedia Kebutuhan Nelayan	62.5 m ²	1
5.	Pertokoan	Penyedia Kebutuhan	605 m ²	28

		Nelayan		
6.	Mina Boga Pengembangan	Penyedia Kebutuhan Nelayan	1.068 m ²	25

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sebagai Unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas SDM Perikanan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut PPN Pengembangan berupaya membangun fasilitas dan sarana prasarana di pelabuhan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di PPN Pengembangan terdiri dari instansi terkait dan para pelaku usaha sebanyak 6.184 orang dapat di sajikan pada Tabel 42. berikut ini :

Tabel 42. Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	Keterangan
1.	UPT PPN Pengembangan	227	PNS 35 orang, PPPK 18 orang. Tenaga kontrak 18 orang. Outsourcing Pengolah data 21 orang. Satpam 18 orang. Kebersihan 15 orang. Pengemudi 3 Orang
2.	Dinas Perikanan (TPI)	16	
3.	POLAIR	17	
4.	TNI – AL	5	
5.	Satwas PSDKP	4	
6.	Adpel Perhubungan	2	
7.	Babinsa	1	
8.	Linmas	1	
9.	Nelayan/ABK Kapal	3.490	
10.	Pengurus Kapal	820	
11.	Panol/Buruh Pikul	900	

12.	Belantik (Penjual ikan)	130	
13.	Pedagang (Kios nelayan) dan Los Pasar Terbuka	155	
14.	PT. Dua Berjaya (SPBN)	10	
15.	Pengemudi Truk Angkut Ikan	65	
16.	Tukang Ojek	25	
17.	Montir/Tukang Las	4	
18.	Supplier Es dan pekerja	15	
19.	PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pengembangan	2	
21.	Pengurus Perahu	164	
22.	Gudang penyimpanan peralatan perahu	6	
23.	Toko penyedia Sparepart	6	
24.	Pencari sisik ikan	4	
25.	Pengumpul minyak ikan	5	
26.	Armada pengangkut ABK perahu	40	Dari darat ke laut
27.	Armada pengangkut es dan garam	40	Dari darat ke laut
28.	Pedagang musiman	12	
29.	Crew Alat Penghancur Es	4	
30.	Pensuplai garam dengan truk	4	
31.	Pembeli dari pihak UPI	10	
Jumlah		6.184	

3.3.3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

1. Evaluasi Pelayanan Tambat Labuh dan Penggunaan Aplikasi SIJAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhan)

PPN Pengembangan mengadakan kegiatan Evaluasi Pelayanan Tambat Labuh dan Penggunaan Aplikasi SIJAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhan) di Pelabuhan Perikanan dengan Narasumber Bapak Iwan Triwinantya, yang dihadiri para undangan pegawai PPN Pengembangan sejumlah 15 orang dan dipimpin Ketua Sub Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan didampingi oleh Ketua Sub Pokja Kesyahbandaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengembangan pada tanggal 19 November 2024.

Aplikasi Sijaka adalah system pelayanan untuk penerbitan pembayaran PNPB untuk jasa Fungsional dan umum di lingkup Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan system SIMPONI Kementerian Keuangan dimana Pengguna Jasa menjadi bagian dari proses bisnis dari penerbitan perintah pembayaran (kode billing). Dengan adanya Aplikasi SIJAKA diharapkan PNPB sektor Kelautan dan Perikanan Non SDA untuk tambat labuh meningkat, proses perhitungan tambat labuh secara system berdasarkan alur pelayanan di Pelabuhan (berdasarkan Sailing Master Declaration), data pelunasan SIMPONI yang lebih akurat karena berbasis data dan interkoneksi langsung dengan SIMPONI, potensi terjadi selisih perhitungan etmal antara petugas TKPU dan Kesyahbandaran terminimalisir karena sudah link dengan system kesyahbandaran (TemanSPB) terkait data rencana keberangkatan kapal.

Manfaat Aplikasi SIJAKA yakni adanya transparansi proses perhitungan tambat labuh, akuntabilitas pelayanan system pelayanan yang terintegrasi dengan kesyahbandaran, otomatisasi pelunasan, dan proses lebih cepat (tanpa menyerahkan dokumen secara manual) dan otomatisasi perhitungan data etmal kapal. Permasalahan dan kendala aplikasi SIJAKA yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah adanya faktor pengurang biaya tambat labuh yang perhitungannya kurang sesuai.

2. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur di Pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 yang bertempat di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

Umum dan Ketua Sub Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha yang dihadiri pengguna jasa sejumlah 30 orang dan Anggota Tim Kerja TKPU yang memberikan paparan Standar Operasional Prosedur lingkup Tata Kelola dan Pelayanan Usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Dengan adanya Sosialisasi ini diharapkan para pengguna jasa memahami terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan - pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan.

3. Sosialisasi Pengendalian Lingkungan

Dalam rangka menindaklanjuti temuan kegiatan ISO 14001 dan Laporan Tahunan KKPRL diadakan Sosialisasi Pengendalian Lingkungan pada tanggal 1 Agustus 2024 yang bertempat di Balai Temu Nelayan PPN Pengambengan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan mengundang narasumber dari 4 Ocean yang dihadiri oleh Stakeholder dan Nelayan lingkup PPN Pengambengan. Dalam rapat ini membahas mengenai upaya preventif untuk pengendalian lingkungan sampah plastik di laut. Selain itu pada kegiatan ini telah disepakati hal-hal/upaya untuk mengurangi sampah plastik untuk menjadikan PPN Pengambengan menjadi Pelabuhan Sehat yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani masing-masing perwakilan undangan.

4. Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan (IKM)

Dalam rangka melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) PPN Pengambengan Tahun 2024, diadakan Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha di Pelabuhan (IKM) pada tanggal 13 Juni 2024 dan 5 Desember 2024 yang bertempat di Balai Temu Nelayan PPN Pengambengan yang dihadiri masing – masing kegiatan pengguna jasa sejumlah 30 orang dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. Dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan II.

3.4. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajerial

3.4.1. Pelaksanaan Anggaran

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPN Pengambengan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Tahun Anggaran 2024 melalui DIPA Nomor : SP DIPA – 032.03.2.633693/2024 tanggal 24 November 2023, memperoleh anggaran dana sebesar Rp. 15.094.595.000.- (Lima belas milyar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

DIPA tersebut mengalami 2 (Dua) kali revisi pada nilai anggaran. Perubahan-perubahan anggaran tahun 2024 adalah:

- a. Perubahan pertama pada tanggal 7 November 2024, terjadi penambahan anggaran terkait kekurangan anggaran untuk gaji dan tunjangan senilai Rp 1.152.064.000.- (Satu milyar seratus lima puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah), sehingga nilai anggaran berubah menjadi Rp 16.246.659.000.- (Enam belasmilyar dua ratus empatpuluhenamjutaenam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Perubahan kedua pada tanggal 13 November 2024, disebabkan adanya penambahan Pagu dari penggunaan kembali kelebihan target PNBPN Non SDA senilai Rp 197.000.000.- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sehingga nilai anggaran berubah menjadi Rp. 16.443.659.000.- (Enam belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja instansi berdasarkan SP2D pada TA 2024 adalah sebesar Rp 15.709.597.130.- atau 95.53% dari anggaran belanja sebesar Rp 16.443.659.000.-. Sedangkan yang tidak terealisasi (sisa dana) yaitu Rp. 734.061.870.- atau sebesar 4.47% dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan :

- Sisa Belanja Pegawai Sebesar Rp. 14.383.537.-
- Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 661.094.596.-
- Sisa Belanja Modal sebesar Rp. 58.583.737.-

Tabel 43. Realisasi Anggaran Sampai dengan 31 Desember 2024

No	URAIAN	TA 2024		
		Anggaran/Target	Realisasi	% ThdAnggaran/Target
I	PENDAPATAN			
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	760.971.000	1.166.849.139	153.33%
	Sub Jumlah I	760.971.000	1.166.849.139	153.33%
II	BELANJA			
1	Belanja Pegawai	6.912.206.000	6.897.822.463	99.79%
2	Belanja Barang	7.730.090.000	7.068.995.404	91.45%
3	Belanja Modal	1.801.363.000	1.742.779.263	96.75%
	Sub Jumlah II	16.443.659.000	15.709.597.130	95.54%

Secara rinci hubungan antara anggaran dan realisasi dapat disajikan pada tabel 44.

Tabel 44. Pagu dan Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2024

KEMENTERIAN : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN PERIKANAN TANGKAP
 SATUAN KERJA : (633693) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI 2024		SISA ANGGARAN
			Realisasi	Prosentase	
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	3.223.798.968	91,64%	293.917.032
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	35.335.653	92,99%	2.664.347
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	24.900.000	24.875.653	99,90%	24.347
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.100.000	10.460.000	79,85%	2.640.000
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	3.155.540.879	93,13%	232.861.121
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	143.185.012	95,46%	6.814.988
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	1.587.441.342	90,69%	162.960.658
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	74.998.920	100,00%	1.080
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	1.349.915.605	95,54%	63.084.395
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	7.854.500	98,18%	145.500
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	7.854.500	98,18%	145.500
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	25.067.936	30,09%	58.246.064
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	25.067.936	30,09%	58.246.064
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.925.943.000	12.486.266.262	96,60%	439.676.738
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.925.943.000	12.486.266.262	96,60%	439.676.738
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	255.108.000	254.900.000	99,92%	208.000
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	12.105.440.000	11.728.428.237	96,89%	377.011.763
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	271.255.000	268.375.660	98,94%	2.879.340
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	40.831.581	74,24%	14.168.419
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	193.730.784	81,01%	45.409.216

3. Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun anggaran 2024 PPN Pengembangan berupaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja sehingga diperoleh hasil sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mendapatkan penilaian IKPA sebesar 96.26 dan capaian SMART DJA 93.13.
2. Capaian Kinerja IKU Pelabuhan berdasarkan Aplikasi Kinerjaku dengan NPSS sebesar 116.46.

3.4.2. Pengelolaan Administrasi Persuratan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sebagai rekaman informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap instansi, seiring dengan kegiatan yang dilaksanakan maka volumenya akan bertambah. Semakin besar tugas pokok dan fungsi instansi maka semakin banyak arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilakukan. Tingkat pertumbuhan arsip di instansi membawa konsekuensi logis terkait dengan penyediaan ruang simpan, sarana kearsipan, tenaga pengelola, waktu dan biaya, serta layanan arsip itu sendiri. Semakin banyak jumlah arsip maka akan mempengaruhi tingkat kecepatan dalam penemuan kembali arsip.

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik Arsip yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna secara total dengan cara pencacahan/pembakaran/bubur kertas sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali dan upaya untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dan menyelamatkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

1. Pengelolaan Persuratan

Persuratan pada periode Januari s.d Desember 2024 dilaksanakan secara konvensional dan elektronik melalui aplikasi Portal KKP. Berikut tabel dan grafik surat masuk dan surat keluar tahun 2024.

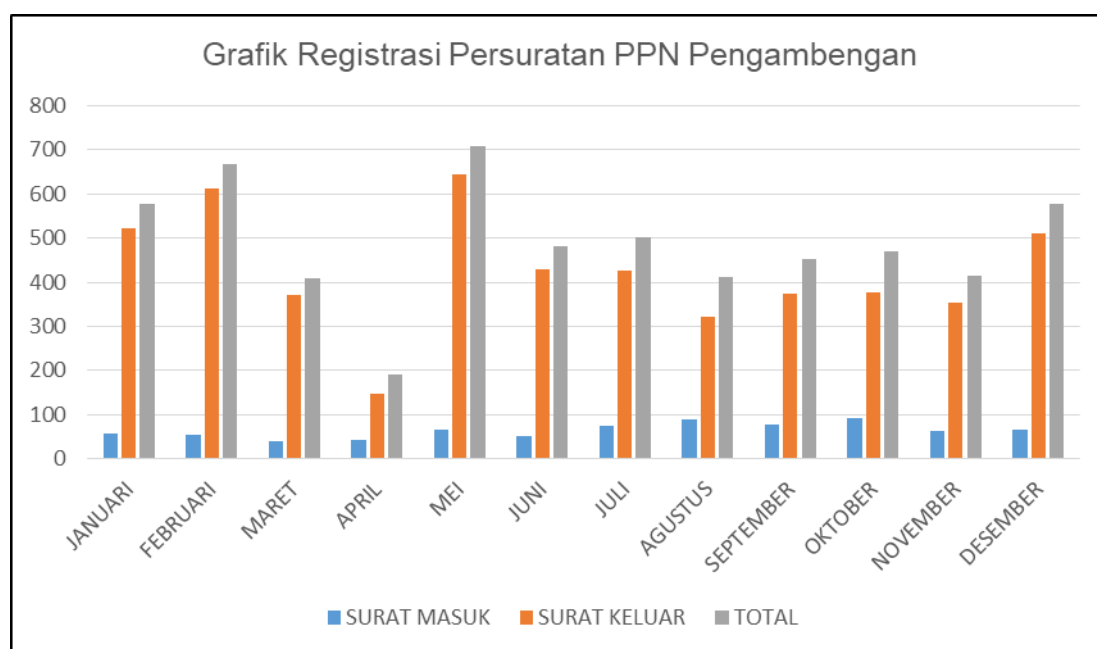
PPN Pengambangan melaksanakan tertib administrasi persuratan selama tahun 2024 jumlah surat masuk dan surat keluar sebagaimana tabel 45.

Tabel 45. Jumlah Surat Masuk dan Keluar di PPN Pengambangan Tahun 2024

No	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	Total
1	Januari	89	343	432
2	Februari	77	195	272
3	Maret	55	255	310

4	April	73	290	363
5	Mei	69	268	337
6	Juni	94	289	383
7	Juli	99	269	368
8	Agustus	69	257	326
9	September	78	178	256
10	Oktober	81	265	346
11	November	75	202	277
12	Desember	109	331	440
Total		968	3142	4110

Grafik 10. Registrasi Persuratan PPN Pengambengan Tahun 2024



2. Pemberkasan Arsip Aktif

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Daftar arsip aktif adalah daftar yang sekurang-kurangnya memuat nomor, kode, deskripsi arsip yang bersumber dari arsip aktif, tahun, volume, tingkat keaslian dan keterangan, yang digunakan sebagai sarana akses atau penemuan arsip aktif di tempat penyimpanan arsip aktif

(central file) lingkungan unit kerja. Pemberkasan dilakukan secara konvensional dan juga dalam aplikasi Portal.

3. Pemusnahan Arsip

Tindakan pemusnahan arsip termasuk salah satu kegiatan dalam pengelolaan arsip. Arsip yang dimusnahkan adalah arsip inaktif yang telah habis masa nilai gunanya. Tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan isi dokumen. Pemusnahan arsip merupakan tindakan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir nilai gunanya. Untuk Tahun 2024, pemusnahan arsip di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan akan dilaksanakan pertengahan tahun 2025.

4. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

Dikarenakan untuk penilaian masih dalam proses, maka hasil sementara Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun dapat dilihat mengalami kenaikan dari penilaian Tahun sebelumnya. Dimana PPN Pengambengan memperoleh nilai dari sebesar 74.81 dengan kategori “BB (Sangat Baik)” sekarang menjadi 92.61 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

Terjadinya kenaikan nilai dikarenakan beberapa factor sebagai berikut :

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

- a. Penciptaan Arsip dari nilai sub aspek dari 21.12 menjadi 22.88

Keterangan: sudah mulai terealisasi penciptaan arsip dan penggunaan aktif portal pada sebagian pegawai

2. Sumber Daya Kearsipan

- a. SDM Kearsipan nilai sub aspek dari 39.00 menjadi 39.56

Keterangan: Faktor pendukung karena terdapat Pengelola Persuratan 1 Orang dan Arsiparis 2 Orang

Berdasarkan hasil penilaian pengawasan tersebut agar pejabat yang bertanggungjawab pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum baik dan hasil pengawasan

tersebut akan menjadi tolak ukur bagaimana perkembangan arsip pada lingkungan Unit Pengolah.

3.4.3. Pengelolaan Kepegawaian

Jumlah pegawai PPN Pengambangan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang dioptimalkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan baik di Pengambangan. Pos Pelayanan Kapal Perikanan di PU Benoa. PP Teluk Awang dan Pelabuhan Binaan di NTB dan NTT .

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa saat ini sebanyak 15 orang dan dibantu dengan PPNPN sebanyak 3 orang. sehingga total pegawai PPN Pengambangan yang ditugaskan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa berjumlah 18 orang.

Selain itu terdapat tenaga kerja yang berasal dari rekrutmen perusahaan (*outsourcing*) sejumlah 33 orang yang terdiri dari 18 orang tenaga keamanan dan 15 orang tenaga kebersihan. Penanganan kebersihan dilaksanakan oleh tim kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan untuk menangani areal pelabuhan seluas 13.5 ha dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan.

Tabel 46. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	35
2	PPPK	18
3	PPNPN	18
4	Outsorsing Pengolah Data	21
5	Outsorsing Satpam	18
6	Outsorsing Kebersihan	15
7	Outsorsing Pengemudi	3
Jumlah		128

Tabel 47. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan
1	PNS	20	15
2	PPPK	11	7
3	PPNPN	11	7
Jumlah		41	29

Tabel 48. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Status Kepegawaian	SMP	SMU	D1/D3/D3	D4/S1	S2
1	PNS	0	5	3	24	3
2	PPPK	0	8	3	7	0
3	PPNPN	1	12	1	4	0
Jumlah		1	25	6	35	3

Tabel 49. Komposisi ASN Berdasarkan pangkat/golongan

No	Status Kepegawaian	IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb
1	PNS	0	1	1	3	4	13	3	9	0	1
2	PPPK	8	0	3	0	7	0	0	0	0	0
Jumlah		8	1	4	3	11	13	3	9	0	1

Tabel 50. Komposisi pegawai berdasarkan posisi penugasan

No.	Uraian		Jumlah
I	Kepala Pelabuhan		
	1	PNS	1
Sub Jumlah I			1
II	Tim Kerja Dukungan Manajerial		
	1	PNS	12
	2	PPPK	2
	3	PPNPN	1
Sub Jumlah II			15
III	Tim Kerja Operasional Pelabuhan		
	1	PNS	9
	2	PPPK	6
	3	PPNPN	5
Sub Jumlah III			20
IV	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha		
	1	PNS	4
	2	PPPK	3
	3	PPNPN	10
Sub Jumlah IV			17
V	Tim Kerja Kesyahbandaran		
	1	PNS	9
	2	PPPK	7
	3	PPNPN	2
Sub Jumlah V			18
Jumlah			71

Tabel 51. Komposisi pegawai berdasarkan lokasi penugasan

No	Status Kepegawaian	Lokasi Penugasan			
		PPN Pengembangan	PU Benoa	PP Teluk awang/Labuan lombok/Tanjung luar	PP Oeba/PP Tenau
1	PNS	25	8	2	0
2	PPPK	10	7	0	1
3	PPNPN	15	3	0	0
Jumlah		50	18	2	1

Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Pembinaan dan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pelabuhan perikanan terus dilakukan melalui kegiatan Bimbingan teknis/pelatihan/kursus, sosialisasi, diklat baik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Daftar kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop yang telah diikuti oleh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat dilihat pada lampiran 2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai juga dilakukan dengan pelaksanaan apel pagi setiap hari kerja dengan tujuan meningkatkan disiplin pegawai. Selain itu juga diadakan rapat pembinaan pegawai yang diikuti oleh seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk mengevaluasi tugas, fungsi dan kedisiplinan pegawai.

Demikian juga dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pengangkatan PNS diberikan pada pegawai yang telah memenuhi syarat. Pegawai-pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pengangkatan PNS dapat dilihat pada Tabel 52 dan Tabel 53.

Tabel 52. Kenaikan Pangkat

No.	KENAIKAN PANGKAT	NAMA	TMT
1	III/c ke III/d	Elwidya Bastian. S.Pi	1 Februari 2024
2	III/a ke III/b	Retno Trimahanani. SE	1 Februari 2024
3	II/d ke III/a	Riffal Iswahyudi	1 Februari 2024

4	III/c ke III/d	Yenni Nurul Kustia. S.Pi	1 April 2024
5	III/c ke III/d	Diana Santiaji. S.Pi	1 April 2024
6	III/c ke III/d	Akhmad Marzuki. S.Kom.. M.T	1 April 2024
7	III/a ke III/b	Mirza Fithry Nurbayanie. SE	1 April 2024
8	III/a ke III/b	Aisyah Nurulita Erka. S.Pi	1 April 2024
9	II/c ke II/d	Supriyanto	1 April 2024
10	II/c ke II/d	Meldiany Ramadhona. A.Md	1 April 2024
11	III/c ke III/d	Luh Putu Ari Widiani. S.Pi	1 Oktober 2024
12	III/a ke III/b	Nurul Lady Choirunisa. S.Psi	1 Desember 2024

Tabel 52. Kenaikan Gaji Berkala

No	KENAIKAN GAJI BERKALA	NAMA	TMT
1.	III/d 14 thn 0 bln ke III/d 16 thn 0 bln	Bagus Sudananjaya. S.St.Pi.. M.Pi	1 Januari 2024
2.	III/b 8 thn 9 bln ke III/b 10 thn 0 bln	Arman. S.Pi	1 Januari 2024
3.	III/c 8 thn 1bln ke III/c 10 thn 0 bln	Siwi Cahya Widodo. S.Pi	1 Maret 2024
4.	III/c 9 thn 11 bln ke III/c 10 thn 0 bln	Elwidya Bastian. S.Pi	1 Maret 2024
5.	III/b 22 thn 0 bln ke III/b 24 thn 0 bln	Sigit Berbudi	1 Maret 2024
6.	III/a 11 thn 1bln ke III/a 12 thn 0 bln	Riffal Iswahyudi	1 Maret 2024
7.	II/b 3 thn 8 bln ke II/b5 thn 0 bln	Mujiburrahman	1 Maret 2024
8.	III/b 16 thn 0 bln ke III/b 18 thn 0 bln	Mirza Fithry Nurbayanie. SE	1 April 2024
9.	III/b 16 thn 0 bln ke III/b 18 thn 0 bln	Mahamuda. SE	1 April 2024
10.	III/b 8 thn 0 bln ke III/b 10 thn 0 bln	Bachtiar Jumaris. S.St.Pi	1 April 2024
11.	IV/b18 thn 0 bln ke IV/b 20 thn 0 bln	Andi Mannoengi. S.St.Pi	1 Desember 2024
12.	III/a 2 thn 0 bln ke III/a 4 thn 0 bln	Nurul Lady Choirunisa. S.Psi	1 Desember 2024
13.	II/d 5thn 10 bln ke II/d 7 thn 0 bln	Elvana Anandha Adian. A.Md.A.B	1 Desember 2024

14.	II/d 6 thn 4bln ke II/d 9 thn 10 bln	Meldiany Ramadhona. A.Md	1 Desember 2024
-----	--------------------------------------	--------------------------	-----------------

Hubungan Kelembagaan

Tata hubungan kerja pelabuhan perikanan dengan instansi terkait yang ada di lingkungan pelabuhan dilakukan dengan prinsip koordinasi dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Instansi terkait yang telah melakukan pelayanan dan mempunyai kantor kerja di pelabuhan adalah :

- 1) Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengambengan
- 2) Pos Polisi Perairan
- 3) Kantor Pelabuhan Gilimanuk Satuan Kerja Pengambengan
- 4) Dinas Perhubungan. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna fasilitas pelabuhan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan perbaikan dan pengembangan berbagai fasilitas yang ada di pelabuhan dan peningkatan pelayanan di bidang administrasi.

Sebagai tindak lanjut dan perwujudan adanya komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di lingkungan PPN Pengambengan maupun dengan pihak lain di luar kawasan diadakan rapat stakeholder serta sosialisasi yang mengundang instansi terkait (Pemda/Pemprov. Kementerian. Pelabuhan Perikanan lain dan tingkat pusat. Polair).

Sebagai pendukung pelayanan prima. pelayanan administrasi mendapat perhatian. gambaran mengenai tingkat pelayanan administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel 6.

3.4.4. Pelaksanaan K5

Pelaksanaan kegiatan K5 di PPN Pengambengan dilaksanakan dengan menngandeng pihak ketiga yaitu PT. Ayuma Usaha Sejahtera. Jumlah personel Satpam 18 orang yang dibagi dalam tiga shift yaitu pagi. sore. dan malam. Kegiatan kebersihan pelabuhan ditangani oleh 15 personel tenaga kebersihan yang bertugas

untuk memastikan kebersihan di seluruh area pelabuhan. Data personil satpam dan tenaga kebersihan PPN Pengambengan tahun 2024 sebagaimana tabel 54 dan tabel 55.

Tabel 54. Data personil satpam PPN Pengambengan tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	KETERANGAN
1	I Made Sutarna	Dandru	5101012710620005	PPN Pengambengan
2	I Putu Tegeh	Anggota	5101013112670153	PPN Pengambengan
3	I Ketut Ary Bharawana	Anggota	5101010801800003	PPN Pengambengan
4	I Ketut Bujana	Anggota	5101012107680005	PPN Pengambengan
5	I Wayan Sujana	Dandru	5101010306690004	PPN Pengambengan
6	I Wayan Suama	Anggota	5101012410640005	PPN Pengambengan
7	I Nengah Pasek Wijaya	Anggota	5101041008900002	PPN Pengambengan
8	Hariato	Anggota	5101050208930002	PPN Pengambengan
9	I Nyoman Sindra	Anggota	5101051503690002	PPN Pengambengan
10	Dicky Ramadhan	Dandru	5101011712970005	PPN Pengambengan
11	Subahani	Anggota	5101010804690002	PPN Pengambengan
12	I Ketut Sirtayasa	Anggota	5101011807800002	PPN Pengambengan
13	Muhamad Husni	Anggota	5101010401860007	PPN Pengambengan
14	I Kadek Adi Pranata	Dandru	5101011011960006	PPN Pengambengan
15	I Kade Gede Suriantika	Anggota	5101010406960010	PPN Pengambengan
16	Ahmad Jayadi	Anggota	5101012009960009	Pos Benoa
17	Ricky Ricardono TP Lubis	Anggota	1271182705840006	PPN Pengambengan
18	I Made Biduendy. SH	Anggota	5108080205640002	Pos Benoa

Tabel 55. Personil tenaga kebersihan PPN Pengambengan tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	NIK	KETERANGAN
1	I Made Guntur Gunawan	Korlap	5101010508690002	PPN Pengambengan
2	Ni Kade Gopi Narayani	Anggota	5101015112960007	PPN Pengambengan
3	I Nengah Sulendra	Anggota	5101013012670095	PPN Pengambengan
4	I Gede Wirawan	Anggota	5101012606660007	PPN Pengambengan
5	I Ketut Wardana	Anggota	5101011405680005	PPN Pengambengan

6	Kadek Sri Rahmawati	Anggota	5101015109890010	PPN Pengambengan
7	Eka Hadi Kurnia	Anggota	5101011404940001	PPN Pengambengan
8	I Ketut Winata	Anggota	5101011609770010	PPN Pengambengan
9	I Kadek Yatna	Anggota	5101012508780005	PPN Pengambengan
10	I Kadek Budi Artayasa	Anggota	5101010203920006	PPN Pengambengan
11	Hilmia	Korru	5101014502920007	PPN Pengambengan
12	Ni Luh Ayu Widyawati	Anggota	5101016401040009	PPN Pengambengan
13	Imam Supi'i	Anggota	5101011008640005	PPN Pengambengan
14	Ni Kade Ayu Putri Sunari	Anggota	5101016111040003	PPN Pengambengan
15	Joni Nur Irawan	Anggota	3510180804040001	Pos Benoa

3.4.5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah proses administrasi dan manajemen yang dilakukan untuk mengatur dan menjaga barang milik negara agar digunakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan BMN mencakup beberapa aspek penting mulai dari pengadaan, pencatatan, pemeliharaan dan perawatan penggunaan dll. PPN Pengambengan pada tahun 2024 melakukan Pengadaan sebanyak 94 Unit/buah. Penetapan Status Penggunaan sebanyak 206 Unit/buah. Penghapusan sebanyak 872 Unit/buah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 56. Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) PPN Pengambengan tahun 2024

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN
1	Hand Palet Truck	KRISBOW 3T	1 Unit	5.006.100.00
2	Sepeda Motor	HONDA BEAT CBS	2 Unit	40.100.000.00
3	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	1 Unit	18.720.000.00
4	Sepeda Motor	YAMAHA NMAX C ABS	1 Unit	36.340.000.00



5	Mesin Pompa air PMK	Panasonic GP-20HCN1SDN	2 Buah	13.600.000.00
6	LCD Projector/Infocus	Acer Projector X1	3 Buah	21.000.000.00
7	Kursi Besi/Metal	Caesar	24 Buah	26.400.000.00
8	Kursi Besi/Metal	Caesar	1 Buah	1.106.000.00
9	Kursi Besi/Metal	INDACHI D-3200	4 Buah	5.695.000.00
10	A.C. Split	POLYTRON 1 PK	1 Buah	5.200.000.00
11	A.C. Split	POLYTRON 2 PK	4 Buah	35.600.000.00
12	Sound System	Lokal	1 Buah	2.800.000.00
13	Dispenser	POLYTRON PWC 776	5 Buah	15.015.000.00
14	Drone	DJI MAVIC 3 PRO	1 Buah	63.000.000.00
15	Drone	DJI MAVIC 3	1 Buah	32.657.657.00
16	Unit Tranceiver Ssb Stationery	SSB ICOM ICM710	1 Buah	29.500.000.00
17	Unit Tranceiver Ssb Stationery	Icom IC-M200	1 Buah	3.842.820.00
18	Timbangan Elektronik	DIG PLATFORM SCALE	2 Buah	3.842.820.00
19	Meja Kerja Stainless	Meja Sortir Stainless	2 Buah	11.000.000.00
20	Lap Top	AXIOO MYBOOK PRO K5	7 Buah	55.650.000.00
21	Lap Top	ASUS P1412CEA	4 Buah	68.000.000.00
22	Lap Top	AXIOO MYBOOK PRO	5 Buah	39.750.000.00
23	Lap Top	ZYREX CRU9ISER 20	10 Buah	79.500.000.00
24	Lap Top	LENOVO YOGA 7	2 Buah	48.000.000.00
25	Printer	Epson L3210	2 Buah	6.000.000.00
26	Printer	Epson L3210	4 Buah	12.000.000.00
27	Printer	HP LASERJET MFP	2 Buah	8.900.000.00
	J U M L A H		94 Buah	688.225.397.00

\

Tabel 57. Penetapan Status Penggunaan PPN Pengambengan tahun 2024

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	JUMLAH BARANG	PEROLEHAN
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Permanen, Gudang Arsip	1 Unit	103.017.000
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Permanen, Gudang Genset	1 Unit	55.418.000
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Permanen, Gudang Alat	1 Unit	83.583.000
4	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	Permanen, Selter Nelayan	1 Unit	276.190.000
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Permanen, Pura	1 Unit	58.956.000
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Permanen, Balai Pertemuan Nelayan	1 Unit	645.692.000
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Permanen, Kantor PSDKP	1 Unit	461.387.000
8	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	Permanen, Parkir roda 2 & 4	1 Unit	330.270.565
9	Taman Permanen	Permanen, Taman Kantor	1 Unit	223.225.237
10	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Permanen, Rumah Negara	1 Unit	516.288.000
11	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Permanen, Rumah Negara	1 Unit	194.797.000
12	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Permanen, Rumah Negara	1 Unit	314.349.000
13	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Permanen, Rumah Negara	1 Unit	121.538.000
14	Pagar Permanen	Permanen, Pagar Besi	1 Unit	175.474.926
15	Sepeda Motor	HAPPY/HP 200-M/RODA 3	1 Unit	37.340.000
16	Sepeda Motor	HAPPY/HP 200-M/RODA 3	1 Unit	37.340.000
17	Rak Besi	Lokal/Besi	5 buah	15.648.780
18	Rak Kayu	Lokal/Rak Buku Pelayanan	2 buah	10.900.000
19	CCTV - Camera Control Television System	CCTV Portable	5 buah	23.986.315
20	Mesin Antrian	Lokal	1 buah	40.306.000
21	Meja Kerja Kayu	Lokal/Meja Segitiga/Gabung	10 buah	81.260.000
22	Kursi Besi/Metal	Indachi	24 buah	134.302.400
23	Sice	Sofa Plus Meja	1 buah	17.400.000
24	Meja Rapat	Lokal/Meja Rapat Bundar	3 buah	43.768.000
25	Meja Resepsionis	Lokal/Meja Sofa Pelayanan	1 buah	2.600.000
26	Sofa	Indachi Senza-1	1 buah	17.600.000
27	A.C. Split	POLYTRON 2 PK	17 buah	144.817.200
28	Televisi	POLYTRON LED TV 55"	2 buah	29.872.400
29	Sound System	TOA	1 buah	11.200.000
30	Dispenser	POLYTRON PWC 776	8 buah	24.020.800

31	Bracket Standing Peralatan	GOLDWIN	2	buah	6.200.000
32	Handy Talky (HT)	ICOM-IC-V86	17	buah	22.440.000
33	Wireless Amplifier	TOA-ZW	1	buah	14.000.000
34	Kursi Dorong	Luna Life/Kursi Roda	1	buah	4.475.900
35	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Meja Laboratorium	1	buah	15.595.500
36	Refrigerator/Freezer	RSA Chest Freezer CF-460	1	buah	6.500.000
37	P.C Unit	LOGO DAC	1	buah	6.750.000
38	Lap Top	ACER TREVELMATE P214	10	buah	100.798.200
39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	11	buah	38.348.400
40	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON WORKFORCE DS 530	2	buah	22.600.000
41	Tenda	Besi / Tenda Pendataan	1	buah	18.200.000
42	Peralatan Permainan Lainnya	1 Set Permainan Anak	1	buah	13.950.000
43	Hand Palet Truck	KRISBOW 3T	1	buah	5.006.100
44	Mesin Pompa air PMK	Panasonic GP-20HCN1SDN	2	buah	13.600.000
45	LCD Projector/Infocus	Acer Projector X1	3	buah	21.000.000
46	Kursi Besi/Metal	Caesar	25	buah	27.506.000
47	Drone	DJI MAVIC 3 PRO	1	buah	63.000.000
48	Unit Tranceiver Ssb Stationery	SSB ICOM ICM710	2	buah	38.750.000
49	Timbangan Elektronik	DIG PLATFORM SCALE 150K	2	buah	3.842.820
50	Meja Kerja Stainless	Meja Sortir Stainless U.238X116	2	buah	11.000.000
51	Lap Top	AXIOO MYBOOK PRO K5	16	buah	163.400.000
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	6	buah	18.000.000
J U M L A H :			206	Item	4.867.510.543

Tabel 58. Penghapusan PPN Pengambengan tahun 2024

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE / SPESIFIKASI / INDETIFIKASI BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH	KONDISI / KETERANGAN
1	Mandi Cuci Kakus MCK	Permanen	1 Unit	28.298.000	Rusak Berat
2	Baggage Trolly	Krisbow	10 buah	6.589.000	Rusak Berat
3	Selo (Kotak Penyimpanan) D	Keranjang	50 buah	25.480.000	Rusak Berat
4	Alat Pengolahan Lainnya	custom/Nampan CS	150 buah	17.094.000	Rusak Berat
5	Peta	PETA INDO & BALI	2 buah	600.000	Rusak Berat
6	Alat Pemotong Kertas	JOYKO	1 buah	550.000	Rusak Berat
7	Meja Kerja Kayu	LOKAL	43 buah	30.098.625	Rusak Berat
8	Kursi Besi/Metal	CHITOSE	91 buah	27.703.875	Rusak Berat
9	Kursi Kayu	LOKAL	4 buah	996.000	Rusak Berat
10	Sice	LOKAL	1 buah	856.535	Rusak Berat
11	Bangku Panjang Kayu	LOKAL	3 buah	990.000	Rusak Berat
12	Alat Pendingin Lainnya	LION STAR BOX 12S	2 buah	890.000	Rusak Berat
13	DVD Player	LG DV581	1 buah	500.000	Rusak Berat
14	Alat Rumah Tangga Lainnya	KERANJANG IKAN	180 buah	45.000.000	Rusak Berat
15	Alat Rumah Tangga Lainnya	Tempat Sampah	25 buah	16.810.200	Rusak Berat
16	Alat Rumah Tangga Lainnya	Timba Stainles dan Sekop	4 buah	1.434.400	Rusak Berat
17	Pakaian Laboratorium	Pakaian Ice Flake	4 buah	994.400	Rusak Berat
18	Staining Trays	greenleaf	10 buah	1.491.380	Rusak Berat
19	Gentong Plastik	Tempat Sampah	50 buah	15.000.000	Rusak Berat
20	Gentong Plastik	KRISBOW/Tempat Sampah	10 buah	1.650.000	Rusak Berat
21	Sepatu Anti Licin	Sepatu Ice Storage	4 buah	3.471.600	Rusak Berat
22	Sepatu Boot	Sepatu Boot	90 buah	17.721.000	Rusak Berat
23	Sepatu Boot	ACE HARDWARE	10 buah	5.780.000	Rusak Berat
24	Alat Pelindung Lainnya	SARUNG TANGAN	4 buah	1.328.800	Rusak Berat
25	Alat Pelindung Lainnya	ROMPI, SARUNG TANGAN, T	90 buah	12.969.000	Rusak Berat
26	Life Jacket	-	20 buah	9.500.000	Rusak Berat
27	Rambu Papan Tambahan	Lokal	12 buah	10.800.000	Rusak Berat
J U M L A H :			872 Item	284.596.815	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Capaian Kinerja Operasional PPN Pengambengan sudah berjalan dengan baik walaupun tidak terlepas dari berbagai permasalahan teknis maupun non teknis yang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugasnya ada beberapa permasalahan operasional yang dihadapi dan seringkali menjadi penghambat bagi kelancaran operasional di PPN Pengambengan dan PU. Benoa antara lain :

4.1 Kelompok Kerja Operasional Pelabuhan

4.1.1 Permasalahan

1. Masih kurangnya kesadaran nelayan/pengusaha penangkap ikan untuk melakukan penanganan ikan yang baik diatas kapal sehingga mutu ikan belum terjaga dengan baik.
2. Kegiatan pendistribusian hasil tangkapan dari TPI ke UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang berada disekitar PPN Pengambengan belum menerapkan metode yang higienis sehingga :
 - a. Sistem rantai dingin tidak terlaksana dengan baik.
 - b. Banyak ikan yang berjatuhan dan limbah penanganan ikan yang berjatuhan di sepanjang jalur distribusi sehingga mengakibatkan bau yang menyengat dan jalanan menjadi licin.
 - c. Ikan terkena sinar matahari langsung.
3. Jarak Pos Pelayanan Kapal Perikanan di Benoa dengan PPN pengambengan yang cukup jauh kurang lebih 120 km atau 3,5 jam perjalanan sehingga menyulitkan dalam hal efisiensi dan efektifitas koordinasi
4. Terdapat beberapa pelayanan terkait Inspeksi Pembongkaran Ikan, penerbitan CDS CCSBT, penerbitan IOTC Bigeye Document, dan penerbitan ICCAT Swordfish Document yang belum dilakukan standar ISO sehingga :
 - a. Kualitas pelayanan belum memenuhi standar baku.
 - b. Pengguna jasa yang ingin menggunakan produk layanan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas produk yang kita berikan.

- c. Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan menjadi kurang.

4.1.2 Upaya Pemecahan Masalah

1. Mengusulkan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kepada nelayan/pengusaha penangkap ikan untuk pentingnya menjaga mutu hasil perikanan.
2. Mengusulkan kegiatan Sosialisasi sistem rantai dingin kepada Sopir Truck pengangkut ikan dan Unit Pengolah Ikan.
3. Melakukan percepatan pembangunan PPN Pengambengan dan pemindahan kapal-kapal perikanan di PU. Benoa ke PPN Pengambengan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien di satu lokasi.
4. Mengajukan permohonan penerapan standar ISO pada beberapa pelayanan seperti Inspeksi Pembongkaran Ikan, Penerbitan CDS CCSBT, penerbitan IOTC *Bigeye Document*, dan penerbitan ICCAT *Swordfish Document*.

4.2 Kelompok Kerja Kesyahbandaran

4.2.1. Permasalahan

1. Kapal Penangkap Ikan Pukat cincin pelagis kecil (slerek) di PPN Pengambengan yang menggunakan 2 (dua) kapal yang masih dalam proses perizinan sehingga beberapa kapal masih belum memiliki dokumen perizinan (SIUP/SIPI) sehingga pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhambat
2. Kedalaman kolam labuh sudah mengalami pendangkalan yang signifikan yang mengakibatkan:
 - a. Kapal dengan ukuran > 30 GT kesulitan untuk melakukan aktivitas bongkar muat.
 - b. Armada kapal dari PU. Benoa mengalami kesulitan masuk ke kolam labuh PPN Pengambengan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan akan kepemilikan Asuransi untuk perlindungan kerja dan jaminan sosial yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan apabila terjadi kecelakaan bagi nelayan.

4. Terbatasnya jumlah syahbandar dan petugas kesyahbandaran guna mendukung kegiatan pelayanan kesyahbandaran sehingga berakibat pelayanan baik administrasi maupun di lapangan kurang optimal.
5. Belum adanya fasilitas perbaikan kapal yang memadai sehingga mengakibatkan:
 - a. Nelayan melakukan perbaikan di areal bongkar muat kapal.
 - b. Terganggunya aktivitas operasional pelabuhan.
6. Terdapat beberapa pelayanan seperti: Verifikasi Logbook Penangkapan Ikan, dan Surat Keterangan Kepatuhan Kapal untuk Pendaftaran Keanggotaan RFMO yang belum dilakukan standar ISO sehingga :
 - a. Kualitas pelayanan belum memenuhi standar baku.
 - b. Pengguna jasa yang ingin menggunakan produk layanan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kualitas produk yang kita berikan.
 - c. Tingkat kepercayaan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan menjadi kurang.
7. Masih adanya kelemahan dan *error* pada aplikasi *e-logbook* penangkapan ikan dan DSS system untuk penerbitan SHTI.
8. Terdapat kapal-kapal yang tidak beroperasi dan/atau mangkrak sehingga fungsi kolam pelabuhan kurang optimal dan berpotensi piutang PNBP yang tidak bisa dipenuhi.

4.2.2. Upaya Pemecahan Masalah

1. Berkoordinasi dan bersinergi dengan Direktorat terkait di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun Dinas Perikanan Provinsi Bali terkait gerai percepatan perizinan berusaha untuk kapal pukat cincin dengan dua kapal.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelabuhan terkait permasalahan pendangkalan kolam pelabuhan yang massif dan menginformasikan kepada pemilik kapal informasi pasang surut setiap hari di kolam pelabuhan serta titik titik rawan kandas di kolam pelabuhan.
3. Memberikan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat asuransi kepada nelayan serta meneruskan Perjanjian Kerjasama yang sudah dibuat antara PPN

Pengambengan dan BPJS Ketenagakerjaan tentang program jaminan asuransi untuk nelayan.

4. Padatahun 2023 terdapat petugas syahbandar yang telah mengikuti Diklat dasar-dasar Kesyahbandaran dan telah dilantik menjadi Syahbandar, namun demikian masih diperlukan lagi diklat kesyahbandaran untuk petugas syahbandar yang belum mengikuti sebagai upaya untuk optimalisasi pelayanan Kesyahbandaran di PPN Pengambengan.
5. Memberikan sosialisasi dan memfasilitasi gerai terkait perizinan kelengkapan dokumen untuk kapal pukat cincin pelagis kecil.
6. Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada nelayan tentang zonasi yang telah dibuat kepada nelayan agar mematuhi aturan yang telah dibuat.
7. Perlu adanya pemberian reward dan punishment terhadap pemilik kapal/nakhoda dalam kepatuhan melaporkan hasil tangkapannya melalui e-logbook;
8. Mengajukan permohonan penerapan standar ISO pada beberapa pelayanan seperti Logbook Penangkapan Ikan, dan Surat Keterangan Kepatuhan Kapal.
9. Mengidentifikasi kapal yang tidak beroperasi lebih dari 3 bulan dan melakukan pemanggilan terhadap pemilik kapal.

4.3 Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

4.3.1. Permasalahan

1. Kondisi jalan lingkungan di pelabuhan saat ini sudah mulai rusak yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di areal pelabuhan terganggu.
2. Fasilitas perbaikan kapal yang sudah tersedia (milik Pemda Jembrana) tidak dapat dimanfaatkan sehingga :
 - a. Fasilitas yang dibangun mengalami kerusakan.
 - b. Hilangnya potensi PNBP dari tanah yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain.
3. Belum adanya pagar kawasan pelabuhan yang mengakibatkan :
 - a. Resiko ketidaknyamanan di pelabuhan meningkat.

- b. Optimalisasi PNBP menurun karena saat ini masih banyak pintu masuk/jalan tikus menuju pelabuhan sehingga pas masuk banyak yang tidak terpungut.
 - c. Batas-batas wilayah pengelolaan pelabuhan menjadi tidak jelas.
 - d. Pengawasan K5 di WKOPP PPN Pengambengan kurang optimal.
4. Kondisi mesin cold storage mengalami penurunan kinerja sehingga dibutuhkan perbaikan agar dapat tercapai kinerja mesin yang maksimal.
5. Kondisi dermaga yang mengalami kerusakan pada titik-titik tertentu sehingga dapat membahayakan kegiatan operasional pelabuhan.
6. Fasilitas penerangan pelabuhan yang belum optimal, karena :
 - a. Solar cell banyak yang rusak dan biaya perawatan terlalu tinggi sehingga tidak terakomodir pada anggaran perawatan jaringan.
 - b. Meningkatnya resiko keamanan pada saat malam hari.
 - c. Perlu adanya penambahan *crane* untuk penunjang kegiatan perbaikan jaringan listrik, operasional bongkar muat, pemangkasan tanaman/pohon.
7. Kedalaman Kolam Labuh belum memenuhi standar operasional untuk PPN yakni minus 3 meter, sedangkan kedalaman kolam labuh pada saat surut terendah saat ini +1 meter berdasarkan hasil pengukuran secara mandiri pada tahun 2023 yang mengakibatkan :
 - a. Akses masuk dan olah gerak kapal terganggu.
 - b. Kapal tidak dapat melakukan tambat dan bongkar di beberapa titik dermaga sehingga kegiatan bongkar muat tidak optimal.
8. Belum optimalnya penggunaan tanah industri Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, yakni dengan adanya tanah pelabuhan yang belum digunakan yakni sekitar 4,5 Ha yang berpotensi meningkatkan PNBP.
9. Penggunaan tanah oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry seluas 2,5 Ha tidak optimal dikarenakan :
 - a. Sesuai dengan perjanjian kontrak jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah processing pembekuan ikan, Cold Storage, Pabrik pengalengan ikan, fish mill dan galangan kapal serta docking kapal, namun dalam

perjalanan kegiatan yang dilaksanakan adalah processing pembekuan ikan, Cold Storage, galangan kapal serta docking kapal.

- b. Sejak tahun 2015 PT. Cilacap Samudera Fishing Industry sudah tidak beroperasi dikarenakan adanya pembenahan kebijakan pemerintah terkait perikanan tangkap.

- 10. Belum adanya fasilitas docking kapal yang dikelola PPN Pengambangan.
- 11. Belum maksimalnya proses perizinan untuk kapal pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal di PPN Pengambangan sehingga berpengaruh pada terhambatnya penerimaan PNBPN tambat labuh.

4.3.2. Upaya Pemecahan Masalah

- 1. Mengusulkan kegiatan untuk pembuatan tempat parkir kendaraan roda dua.
- 2. Mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan pelabuhan dengan menggunakan beton.
- 3. Mengusulkan pembangunan docking/ tempat perbaikan kapal pada zona yang telah ditentukan.
- 4. Mengusulkan pembangunan pagar kawasan pelabuhan.
- 5. Mengusulkan biaya perbaikan mesin cold storage.
- 6. Melakukan pengecekan pada titik-titik dermaga yang mengalami kerusakan dan segera mengusulkan anggaran untuk perbaikan dermaga.
- 7. Mengusulkan pemasangan jaringan/instalasi penerangan jalan dan dermaga dan penambahan fasilitas *crane* untuk kegiatan operasional di pelabuhan.
- 8. Mengusulkan pengerukan kolam labuh.
- 9. Melakukan promosi terkait tanah industri yang bisa digunakan oleh investor di PPN Pengambangan melalui pameran/sosialisasi.
- 10. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan tanah industri oleh PT. Cilacap Samudera Fishing Industry.
- 11. Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, maka nelayan Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal mulai mengurus dokumen perizinan kapal. Dengan adanya dokumen perizinan, maka SPB dapat diterbitkan dan biaya tambat labuh melalui SIJAKA dapat dilaksanakan.

4.4 Kelompok Kerja Dukungan Manajerial

4.4.1. Permasalahan

1. Kurangnya SDM Satpam dan kebersihan yang mengakibatkan kegiatan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keselamatan kerja (K5) tidak berjalan dengan efektif.
2. Kurangnya SDM Pengelola Keuangan yang mengakibatkan kelebihan beban kerja di satu jabatan.
3. Belum tersedianya sarana pelayanan publik mengakibatkan pelayanan prima tidak optimal.
4. Dalam pengelolaan persuratan pada tahun 2023, masih banyak ditemukan surat yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Dalam pemberkasan arsip, belum tersedianya filling cabinet untuk menampung arsip – arsip aktif konvensional yang akan diberkaskan.

4.4.2. Pemecahan Masalah

1. Penambahan jumlah SDM Pengelola keuangan, kebersihan dan satpam.
2. Mengusulkan pengadaan Sarana Pelayanan Publik di Gedung Pelayanan Terpadu pada tahun anggaran 2025.
3. Memberikan arahan dan masukan untuk program pengelolaan kearsipan tahun 2024.
4. Pemberian pelatihan/diklat fungsional untuk arsiparis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk menunjang kinerja arsiparis dan penilaian pengawasan kearsipan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.
6. Melakukan digitalisasi arsip (terutama perencanaan dan pelaksanaan alih media arsip vital).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan tentang realisasi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024, maka dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tahun 2024 mencapai 23.493 Ton, atau rata-rata produksi sebesar 72,73 Ton/hari atau mengalami kenaikan sebesar 67 % apabila di bandingkan dengan pendaratan ikan pada tahun 2023 sebesar 14.057 Ton dengan rata-rata produksi 50,38 ton/hari. Frekuensi pendaratan ikan dari tahun 2019 – 2022 mengalami penurunan, dan pada tahun 2023 dan tahun 2024 produksi hasil tangkapan mengalami peningkatan;
2. Kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tahun 2023 adalah sebanyak 8.531 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 4.473 kali, maka mengalami peningkatan sebesar 47,5%;
3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tahun 2024 telah diterbitkan SPB sebanyak 266 dokumen sedangkan pada Tahun 2023 sejumlah 115 dokumen;
4. Jumlah pengusaha yang menggunakan tanah dan/bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah sebanyak 58 pelaku usaha.
5. Realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.166.849.139,- dimana dari PNBP Umum sebesar Rp. 23.779.600,- dan PNBP Fungsional sebesar Rp. 1.143.069.539,- atau tercapai sebesar 50,2% dari target PNBP Fungsional yang ditetapkan sebesar Rp. 760.971.000,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan

PNBP Fungsional sebesar Rp. 1.016.561.518,- maka mengalami peningkatan sebesar 10,20%.

6. Penerimaan PNBP dari jasa penggunaan *cold storage* tahun 2024 sebesar Rp. 348.133.241,- atau memberikan kontribusi 54,2% dari target PNBP yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan penerimaan *cold storage* tahun 2023 sebesar Rp. Rp. 45.436.060,- maka pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 87%.
7. Perlu pengembangan/perbaikan fasilitas yang dibutuhkan antara lain ; (1) Pagar kawasan, (2) tempat pemeliharaan kapal/docking kapal, (3) Pengerukan kolam labuh , (4) Perbaikan dermaga, (5) Perbaikan jalan lingkungan, (6) Penambahan /perbaikan fasilitas penerangan sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan lancar.
8. Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada tahun 2024 sebesar Rp 15.709.597.130,- dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.443.659.000 atau mencapai 95,53%.
9. Jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan di PU. Benoa pada tahun 2023 sebanyak 781 dokumen dengan jumlah produksi sebanyak 21.976 ton. Berdasarkan data tersebut jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan mengalami penurunan sebesar 2,82% dibandingkan pada tahun 2022. Jumlah produksi mengalami penurunan sebesar 23,03% dibandingkan pada tahun 2022;
10. Jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan di PU. Benoa pada tahun 2024 sebanyak 871 dokumen dengan jumlah produksi sebanyak 16.895 ton. Berdasarkan data tersebut jumlah penerimaan logbook penangkapan ikan mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan pada tahun 2023 dengan jumlah penerimaan logbook 781 dokumen, namun jumlah produksi mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan pada tahun 2023;
11. Jumlah inspeksi pembongkaran ikan di PU. Benoa pada tahun 2024 sebanyak 271 kapal dan tidak ada penerbitan dokumen SKH IPI. Berdasarkan data tersebut jumlah inspeksi pembongkaran ikan mengalami penurunan sebesar 44% dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 492 kapal. Jumlah penerbitan sertifikat CPIB pada tahun 2024 sebanyak 313

dokumen. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan sertifikat CPIB mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan pada tahun 2023;

12. Jumlah penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) pada tahun 2024 antara lain Lembar Awal sebanyak 2.574 dokumen, SHTI Lembar Turunan sebanyak 754 dokumen, dan SHTI Lembar Turunan Disederhanakan sebanyak 166 dokumen. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan Lembar Awal mengalami peningkatan sebesar 45%, SHTI Lembar Turunan mengalami peningkatan sebesar 35,6% dan SHTI Lembar Turunan Disederhanakan mengalami peningkatan sebesar 29% dibandingkan pada tahun 2022;
13. Jumlah penerbitan CDS CCSBT untuk Catch Tagging Form (CTF) di PU. Benoa pada tahun 2024 sebanyak 1.050 dokumen dengan jumlah Southern Bluefin Tuna yang tertangkap sebanyak 1.064.542 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan CDS CCSBT mengalami peningkatan sebesar 17,6% dibandingkan pada tahun 2023. Jumlah produksi Southern Bluefin Tuna mengalami peningkatan sebesar 11,12% dibandingkan pada tahun 2023;
14. Jumlah penerbitan IOTC Bigeye Tuna Statistical Document di PU. Benoa pada tahun 2024 sebanyak 202 dokumen dengan jumlah produksi Bigeye Tuna sebanyak 187.193 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan IOTC Bigeye Tuna Statistical Document mengalami kenaikan sebesar 24% dibandingkan pada tahun 2023;
15. Jumlah penerbitan ICCAT Swordfish Statistical Document di PU. Benoa pada tahun 2024 sebanyak 671 dokumen dengan jumlah produksi Swordfish sebanyak 878.785,60 kg. Berdasarkan data tersebut jumlah penerbitan ICCAT Swordfish Statistical Document mengalami peningkatan 50,8% dibandingkan pada tahun 2023;
16. Input data PIPP di PU. Benoa pada tahun 2023 dengan jumlah kapal yang terinput sebanyak 1.482 kapal. Berdasarkan data tersebut jumlah kapal yang diinput ke dalam PIPP mengalami kenaikan sebesar 33% dibandingkan pada tahun 2023. Jumlah produksi ikan yang diinput ke dalam PIPP sebanyak 45.184.938 kg.

5.2. Saran

1. Kegiatan yang perlu dilaksanakan berdasarkan rencana prioritas adalah sebagai berikut : pembangunan pagar kawasan, pengerukan kolam labuh, peningkatan kualitas jalan pelabuhan, unit pengolahan air bersih, pengelolaan IPAL di wilayah pelabuhan.
2. Telah dibangun Gedung Pelayanan Terpadu dan Pertokoan/Kios Penyedia Akomodasi Nelayan dalam rangka peningkatan fasilitas di pelabuhan.
3. Perlu adanya publikasi tentang PPN Pengembangan yang dapat menarik investor untuk membuka usaha di kawasan PPN Pengembangan karena adanya peluang investasi yang sangat besar pada pengoperasian pabrik es, cold storage, perusahaan pengolahan dan perusahaan penangkapan.
4. Pemanfaatan anggaran seoptimal mungkin, apabila ada sisa anggaran dari suatu kegiatan supaya dapat di revisi sehingga bisa untuk menjadi anggaran dari kegiatan yang lain/baru yang lebih bermanfaat bagi stakeholder.
5. Kegiatan yang perlu dilaksanakan ke depannya adalah sebagai berikut:
 - a. peningkatan sosialisasi kepatuhan pelaporan *elogbook* penangkapan ikan dan aktivasi *elogbook* penangkapan ikan untuk kapal di bawah 30 GT;
 - b. peningkatan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait pelaksanaan CPIB di atas kapal;
 - c. peningkatan pelaporan dan *tagging Southern Bluefin Tuna* yang didaratkan di PU. Benoa;
 - d. permohonan pengajuan produk layanan yang ada di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa sesuai dengan standar ISO.
6. Perlu adanya publikasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pos Pelayanan Kapal Perikanan Benoa melalui media sosial seperti: instagram, twitter, facebook, youtube, dan lain-lain
7. Koordinasi secara intensif dengan KSOP Kelas II Benoa, PSDKP Benoa, BKIPM Kelas I Denpasar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali terkait pendataan kegiatan perikanan di PU. Benoa.

Lampiran 1. Foto Fasilitas Pokok PPN Pengambengan

Kolam pelabuhan 30 Ha dan lahan 13,5 Ha



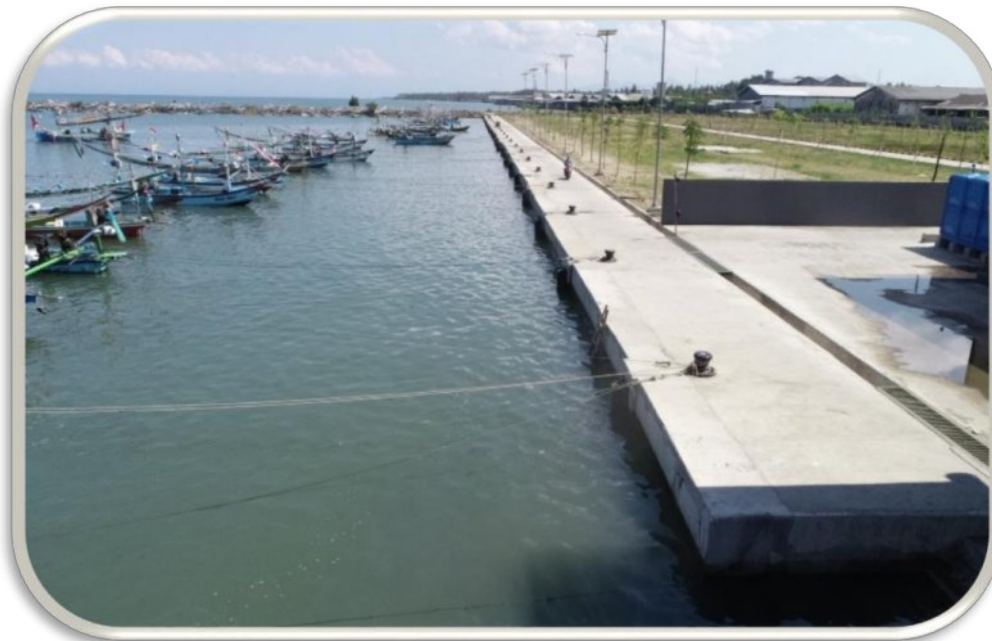
Jetty 65 x 4 m (2 unit)



Dermaga utama 181 x 7 m



Dermaga turap 360 x 3 m



Break Water Kanan dan Kiri Luas 1.627 ml



Jalan lingkungan (13.815 m)



Lampiran 2. Foto Fasilitas Fungsional PPN Pengambengan

Gedung Kantor dan Pelayanan Terpadu Luas 1.170 m²



Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas 320 m²



Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis Luas 889 m2



Cold Storage Luas 616 m2



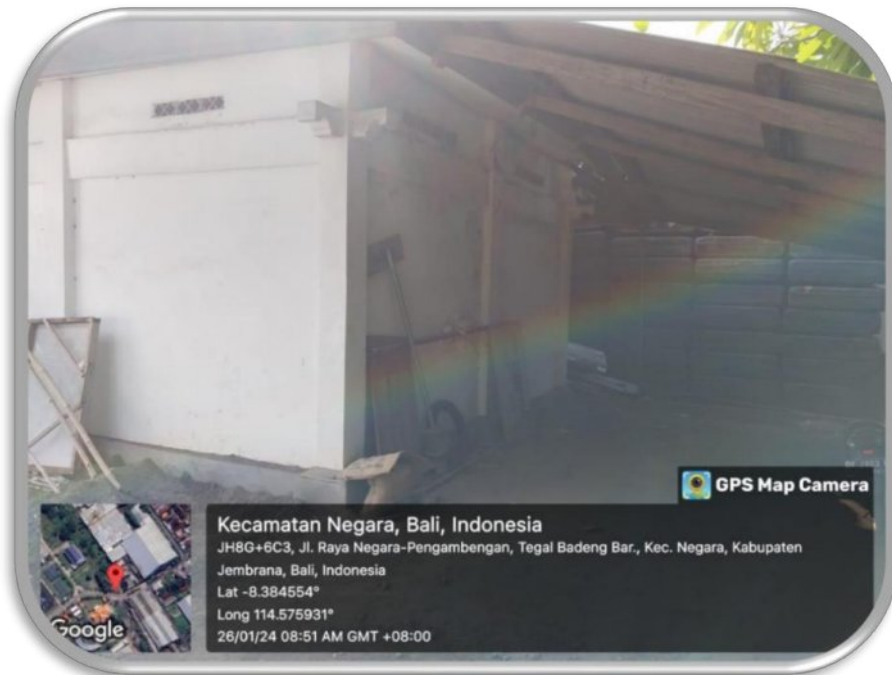
SBPN Luas 838 m2



Gedung Kantor 1 Luas 240 m2



Gudang Arsip Luas 30 m²



Bangsai Perbaikan Jaring Luas 400 m²



Shelter Nelayan Luas 75 m2



Menara Air Luas 166 m2



Instalasi Listrik Luas 230 KVA



Rumah Dinas 1 Luas 102 m2



Rumah Dinas 2 Luas 60 m2



Rumah Dinas 3 Luas 96 m2



Rumah Dinas 4 Luas 43 m2



Kantor Bina Mutu Luas 152 m2



Lampiran 3. Foto Fasilitas Penunjang PPN Pengambengan

Balai Pertemuan Nelayan Luas 204 m2



Tempat Ibadah (Pura) Luas 145 m2



Musholla Luas 98 m2



Pertokoan 1 Luas 605 m2



Pertokoan 2 Luas 30 m2



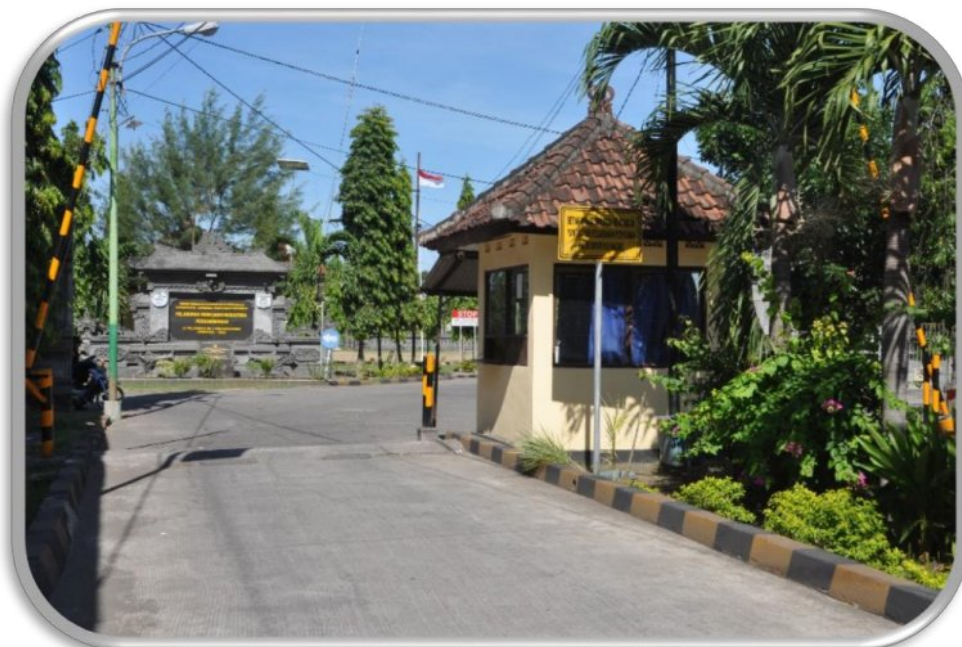
Parkir Roda 2 Luas 792 m2



Parkir Roda 2 untuk Pegawai Luas 150 m2



Pos PNBP Pas Masuk Luas 4 m2



Pos Satpam Luas 16 m2



Lampiran 4. Foto Kegiatan Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024

1. Foto Kegiatan Bulan Januari Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Disiplin Pegawai



Terlibat dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Teknokratik KKP



Gerei Percepatan Perizinan Kapal



Rapat Koordinasi dan Dialog Kinerja
Pelaksanaan Kegiatan Prioritas di Lingkup DJPT



Diskusi dengan Pelaku Usaha
Terkait Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan di PU. Benoa Bali



2. Foto Kegiatan Bulan Februari Tahun 2024

Kunjungan Bank Indonesia terkait Pengembangan UMKM



Rapat Pelaksanaan Marine On The Spot



Rapat Koordinasi dengan Stakeholder



3. Foto Kegiatan Bulan Maret Tahun 2024

Kunjungan Balai Monitoring Kelas I Denpasar terkait Bimtek Long Range Certificate (LRC) untuk nelayan



Inspeksi Kapal Perikanan terkait Perizinan, Pengawasan, dan Aturan yang diterapkan di PU Benoa Bali





Kunjungan BMKG Denpasar



Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan I



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan PPPK



Percepatan Perizinan Kapal Perikanan



Sosialisasi API



4. Foto Kegiatan Bulan April Tahun 2024

BIMTEK Cara Penanganan Ikan Yang Baik di PP Tenau



Sosialisasi dan Bimtek LCR



Kegiatan Upacara Senin, 29 April 2024



5. Foto Kegiatan Bulan Mei Tahun 2024

Audit Internal Iso 14001:2015



Kunjungan DITJEN PDS



Memperingati Hari Tuna Dunia



Kegiatan Audit External ISO



Kunjungan Dinas PINRANG



KUNJUNGAN KERJA
PLT DIRJEN PERIKANAN TANGKAP

BENOA, 15 MEI 2024

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
#2024 KKP BEYOND



Kunjungan Kementerian Sekretariat Negara RI



Sosialisasi Operasional Kesyahbandaran



Presentasi Hasil Paraktik Taruna STP



Sosialisasi E-Logbook



6. Foto Kegiatan Bulan Juni Tahun 2024

Rapat Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan



Evaluasi PNBP dan Kepatuhan Kegiatan Usaha



Memperingati Hari Laut Sedunia



Kunjungan KEMENKOMARVES



Kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara



Pembinaan Pegawai



Kunjungan Praktek Lapangan Poltek KP Jembrana



RAKOR Data Produksi di Pelabuhan Perikanan



Sosialisasi TOT Penggunaan Aplikasi E-PIT Versi Web



Kegiatan Upacara Hari Lahir Pancasila



7. Foto Kegiatan Bulan Juli Tahun 2024

Kunjungan BPSPL Denpasar



Kunjungan Asisten II Perekonomian PEMKAB Jembrana



Kunjungan Investor



Kunjungan Sandiaga Uno



Monev Kinerja Triwulan II



Monev Standar Pelayanan



Kunjungan NAFIQPM



Pembukaan Orientasi PPPK



Kunjungan Laboli



Rapat Koordinasi Pengembangan Pelabuhan PPN Pengembangan



Penyusunan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran)



Sosialisasi dan Konsultasi Publik



Sosialisasi SHTI Benoa



Uji Lab Lemuru



8. Foto Kegiatan Bulan Agustus Tahun 2024

Kunjungan BMKG Wilayah III Denpasar



Penerimaan Taruna Praktek Poltek KP Kupang dan Poltek KP Dumai



Kunjungan Dir. PSD, BRIN dan CSIRO



Bakti Nelayan Tabanan



Bimbingan Teknis Fasilitasi Pendanaan Usaha Nelayan



Bimtek Long Range Certificate



Koordinasi Pelaksanaan Proses Bisnis Level 3



Kunjungan Tim Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan



Penebaran Benih Ikan Nila



Rapat Persiapan 17 Agustus



Koordinasi Dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan



Kunjungan Kerja



Lomba 17 Agustus 2024



Upacara 17 Agustus 2024



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI



Kunjungan Lapangan Dirjen Perikanan Tangkap



Konsolidasi Teknis



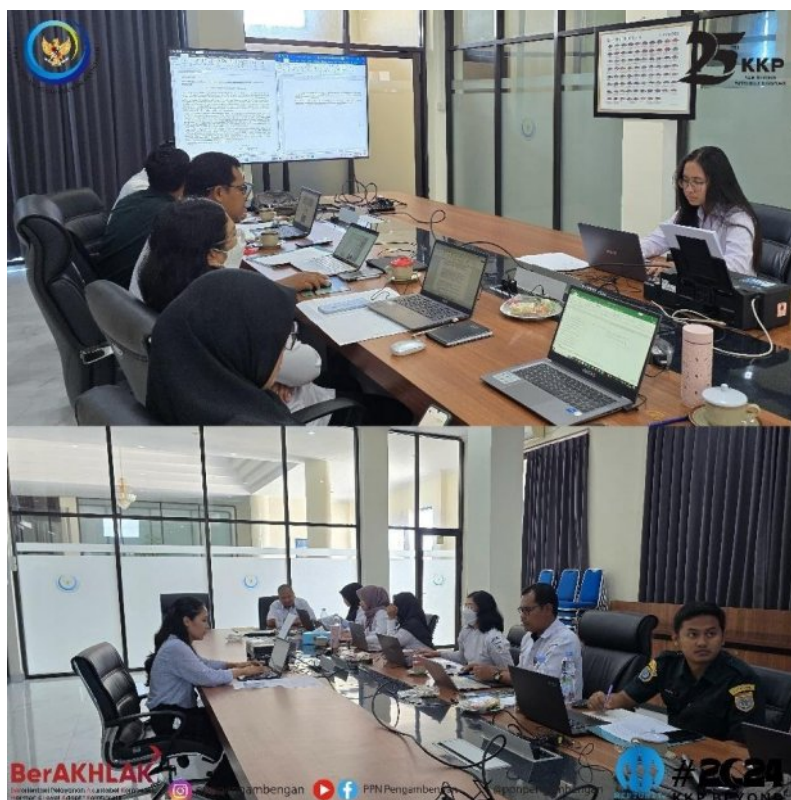
Konsultasi Publik



International Training Of Fisheries For African Countries



Interview Tenaga Administrasi



10. Foto Kegiatan Bulan Oktober Tahun 2024

Kegiatan Sosialisasi RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap
TA 2025



Ulang Tahun KKP



11. Foto Kegiatan Bulan November Tahun 2024

Kunjungan PPP Mayangan



Forum Konsultasi Publik



Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Hari Ikan Nasional



Evaluasi Optimalisasi PNBP Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



12. Foto Kegiatan Bulan Desember Tahun 2024

Sosialisasi TCG Indonesia Tiongkok



Keikutsertaan PPN Pengambengan dalam Moneyv IFP - IFM Phase 1



Kunjungan Dirjen Perikanan Tangkap Dalam Rangka Meninjau Kesiapan
Pembangunan PPN Pengambengan Menjadi Pelabuhan Bertaraf Internasional

